# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

### Tentang G I R O

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahtera-an dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
  - b. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
  - c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah.

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

- "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".
- 3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."

5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةُ اِشْتَرَ مَ عَلَى صَاحِيهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَتْزلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَريَ بِهِ دَابَّةُ دَاتَ كَيدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

- "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).
- 6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

- "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
- 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).
- 8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
- 9. Qiyas. Transaksi mudharabah, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, shahib al-mal) kepada pihak lain ('amil, mudharib) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
- 10. Kaidah fiqh:

- "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
- 11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam

usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari

Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

- 1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah:

- 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi'ah:

- 1. Bersifat titipan.
- 2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call).
- 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>26 Dzulhijjah 1420 H</u>.

1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

### Tentang

T A B U N G A N بسم اللهِ الرَّحْمن الرَّحيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk per-bankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
  - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 283:

- "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".
- 3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةُ اِشْتَرَى َ عَلَى صَاحِيهِ أَنْ لاَ يَسْتُرَي بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَتْزَلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةُ دَاتَ كَيدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلْغَ شَرْطُهُ رَسُولً اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلْغَ شَرْطُهُ رَسُولً اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

- "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).
- 6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

- "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
- 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).
- 8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
- 9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
- 10. Kaidah figh:

- "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
- 11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai

kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari

Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

- 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

- 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

- 1. Bersifat simpanan.
- 2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan kesepakatan.
- 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: <u>26 Dzulhijjah 1420 H</u>.

1 April 2000 M

### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

### FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

### Tentang

DEPOSITO

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

### Dewan Syari'ah Nasional setelah

#### Menimbang

- : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
  - b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
  - c. bahwa oleh karena itu, DSN mempandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

### Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

- "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".
- 3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

"...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ...."

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَهُ اِشْتُرَطَ عَلَى صَاحِيهِ أَنْ لاَ يَسْتُرَيَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتُرِيَ بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلْغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس). sbas bin Abdul Muthallib iika menyerahkan harta sebagai

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

- "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
- 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صَلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه النهمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).
- 8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
- 9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
- 10. Kaidah fiqh:

الأصل فِي المُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktif-kannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari

Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

- 1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

- 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>26 Dzulhijjah 1420 H</u>.

1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

### **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL** NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

### **Tentang**

#### **MURABAHAH**

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank svari'ah.

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

4. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 280:

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

- "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
- 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).
- 8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

- "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."
- 9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبْتَهُ.
- "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."
- 10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

- "Rasulullah saw. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."
- 11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i,* juz 5 Hal. 220-222).
- 12. Kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama

: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

- 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar *uang muka* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- 7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

#### Ketiga

### : Jaminan dalam Murabahah:

- 1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

#### Keempat

### : Hutang dalam Murabahah:

- 1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pemba-yaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

#### Kelima

#### : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### Ketujuh

### : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>26 Dzulhijjah 1420 H</u>. 1 April 2000 M

### DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

### FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

## Tentang JUAL BELI SAHAM

### بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

### **Dewan Syari'ah Nasional setelah**

Menimbang

- a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam, kini telah melibatkan pihak perbankan;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang salam untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 282:

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...".

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلُفَ فِي شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

5. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: لَىُّ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبْتَهُ. "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

الصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).
- 8. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).
- 9. Kaidah fiqh:

الأصلُّ فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إلاَّ أنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SAHAM

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

- 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

: (السلم الموازي): Ketiga : Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:

- a. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

rgsmitra.com

- 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
  - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
  - b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>29 Dzulhijjah 1420 H</u>.

4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 06/DSN-MUI/IV/2000

## Tentang JUAL BELI ISTISHNA'

بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

Menimbang

- : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli istishna' (الأستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani');
  - b. bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
  - c. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.

Mengingat

: 1. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

2. Hadis Nabi:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

3. Kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

4. Menurut mazhab Hanafi, istishna' hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

masa awai taripa ada piriak (diama) yang mengingkarinya

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA'

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

Memperhatikan

- 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

*Kedua* : Ketentuan tentang Barang:

- 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5. Pembeli (pembeli, *mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan Lain:

- 1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
- 3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.

4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

### **Tentang**

### PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
  - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

- "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".
- 4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةُ الشُترَطُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ

بَحْرًا، وَلا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةُ دَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلْغَ شَرَطُهُ رَسُولً مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: أَنَّ النَّبِيَّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَلاَثُ فِيهِنَّ الْبَرِكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضِكَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ لِلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضِكَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ لِلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضِكَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ لِلْبَيْعِ إِلَى الْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن ماجهب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

- "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraguthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).
- 8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
- 9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

### 10. Kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama

: Ketentuan Pembiayaan:

- 1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

### Ketiga

- : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:
  - 1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  - Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  - 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.

4 April 2000 M

### DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

Drs. H.A. Nazri Adlani

### DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

: a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;

- b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keun-tungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat: 1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....'

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

- "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
- 4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
- 5. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
- 6. Ijma' Ulama atas keboleh musyarakah.
- 7. Kaidah figh:

ٱلأصلُ فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

rgsmitra.com

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

- 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
      - Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  - Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

### c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- 4. Biaya Operasional dan Persengketaan
  - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1421 H.

13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

## Tentang PEMBIAYAAN IJARAH

### بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
  - b. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;
  - bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الْدُنْيَا، ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ورَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْ ا أَوْ لَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمَتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفْ، وَ اتَّقُوا الله، وَ اعْلَمُوْ ا أَنَّ اللهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

5. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Wagqash, ia berkata:

كُنَّا ثُكْرِي الأرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَر نَا أَنْ ثُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَيَّةٍ.

"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

# الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- 8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
- 9. Kaidah figh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

### دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصالِح

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Pernyataan ijab dan qabul.

- 2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- 3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- 4. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5. Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

- 1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah.
- 8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga

: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- 1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
  - a. Menyediakan aset yang disewakan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
  - c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
- 2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
  - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>08 Muharram 1421 H</u>.

13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

### FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

### Tentang WAKALAH

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
  - b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
  - c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وكذلك بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُو البَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَيثُتُمْ، قَالُو اللهِ لَيثُنُم مَا لَيثُتُمْ فَابْعَتُو اللهِ الْمِثْنَا يَوْمًا أَو بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُو الرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِئْتُمْ فَابْعَتُو المَدَيْنَةِ فَلْيَنْظُر الْيُهَا أَنْ كَى طَعَامًا أَحَدَكُمْ بِورَقِكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُر الْيُهَا أَنْ كَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّف وَلا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا.

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

اَجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ، إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلَيْمٌ. "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman." 3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

- "...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".
- 4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

أنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَاعْلَطْ فَهُمَّ بِهِ أَصِحْابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصِاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً، عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصِاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنِّهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَانَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ لِنِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ لَانَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عَنْ أبي هُرَيْمَ أُحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَـلاً مَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلاً عَلَـى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرُطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
- Umat Islam ijma' tas kebolehkan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis.
- 8. Kaidah figh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: FATWA TENTANG WAKALAH

Pertama

: Ketentuan tentang Wakalah:

- 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua

: Rukun dan Syarat Wakalah:

- 1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a. Cakap hukum,
  - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3. Hal-hal yang diwakilkan
  - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
  - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>08 Muharram 1421 H</u>.

13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

**Prof. KH. Ali Yafie** 

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

### Tentang KAFALAH

### بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 'anhu, ashil);
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, LKS berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah;
  - c. bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

: 1. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72::

# قَالُوا نَقْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

3. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ أَتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصلِّيَ عَلَيْهِا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟ قَالُوا: لا، فَصلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى،

فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُوا عَلَى صَلُوا عَلَى صَالَةِ مَا اللهِ عَلَى صَاحِيكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَارَسُولَ اللهِ، فَصلَى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

4. Sabda Rasulullah SAW:

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

# الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

6. Kaidah figh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضرّرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

- 2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- 3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua

- : Rukun dan Syarat Kafalah
  - 1. Pihak Penjamin (Kafiil)
    - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
    - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
  - 2. Pihak Orang yang berhutang (Ashiil, Makfuul 'anhu)
    - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
    - b. Dikenal oleh penjamin.
  - 3. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
    - a. Diketahui identitasnya.
    - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
    - c. Berakal sehat.
  - 4. Obyek Penjaminan (Makful Bihi)
    - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
    - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
    - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
    - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
    - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.

13 April 2000 M

#### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

Drs. H.A. Nazri Adlani

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 12/DSN-MUI/IV/2000

# Tentang H A W A L A H

# بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- : a. bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutanghutangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya;
  - b. bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS;
  - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *hawalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

: 1. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

"Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah" (HR. Bukhari).

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
- 3. Ijma. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.
- 4. Kaidah figh:

اَلْأَصِلْ فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلُ عَلَى الْمُعَامِلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضرَّر رُ بُز ال

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG HAWALAH

Pertama : Ketentuan Umum dalam Hawalah:

- 1. Rukun hawalah adalah *muhil* (المحيل), yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (المحتال), yakni orang berpiutang kepada muhil, *muhal 'alaih* (المحال عليه), yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada muhtal, *muhal bih* (المحال به), yakni hutang muhil kepada muhtal, dan *sighat* (ijab-qabul).
- 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih.
- 5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

Kedua

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: <u>08 Muharram 1421 H.</u>

13 April 2000 M

#### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie

Drs. H.A. Nazri Adlani

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 13/DSN-MUI/IX/2000

# **Tentang**

# **UANG MUKA DALAM MURABAHAH**

بسم اللهِ الرَّحْمن الرَّحيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbana

- : a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Ke-uangan Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَأَلُّهُا الَّذِيْنَ آمَنُو الإِذَا تَدَايَئْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى فَاكْتُبُو هُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutangpiutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو الْوَقُو اللَّهُ قُود . . .

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُلُهُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلُحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّا حَرَامًا.

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
- 4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

5. Kaidah figh:

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضرّر رُ يُزالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*).

#### Memperhatikan

- : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
  - b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka:

- 1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- 2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kedua

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: <u>17 Jumadil Akhir 1421 H</u>.

16 September 2000 M.

# **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Dr. H.M. Din Syamsuddin

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 14/DSN-MUI/IX/2000

## **Tentang**

# SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

## Menimbang

- : a. bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu Cash Basis, yakni "prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya" dan Accrual Basis, yakni "prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode"; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
  - bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat diguna-kan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
  - c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dalam LKS untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

# Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: يَأْلُهُمَا النَّيْنَ آمَنُواْ الِذَا تَدَايَتْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسْمَّى فَاكْتُلُبُونُهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutangpiutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو ْا أُو ْقُو ْا بِالْعُقُو ْدِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ أَوْ أَحَلَّ عَرَامًا.

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
- 4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

الأضرر والأضرار.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

5. Kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصلْحَةُ فَتُمَّ حُكْمُ اللهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Memperhatikan

- : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
  - b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM

LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).

3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: <u>17 Jumadil Akhir 1421 H</u>.

16 September 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Dr. H.M. Din Syamsuddin

# **DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**

# **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

# **Tentang** PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional setelah

# Menimbang

- bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) : a. dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelo-laan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
  - b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat diguna-kan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
  - c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

## Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: يَأْلُهُمَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَثُتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ مُنْ ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutangpiutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أُوفُوْا بِالْعُقُوْدِ . . .

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أُو ْ أَحَلَّ حَرَ امًا.

- "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
- 4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لأضرر ولاضرار

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

5. Kaidah figh:

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصِلْحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللهِ. "Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Memperhatikan

- : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
  - b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

: FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM Menetapkan

LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Pertema : Ketentuan Umum

- 1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- 2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing).
- 3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>17 Jumadil Akhir 1421 H</u>.

16 September 2000 M.

# **DEWAN SYARI'AH NASIONAL** MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Dr. H.M. Din Syamsuddin

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 16/DSN-MUI/IX/2000

# Tentang DISKON DALAM MURABAHAH

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

Menimbang

- : a. bahwa salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan;
  - b. bahwa penjual (Lembaga Keuangan Syari'ah, LKS) terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (supplier);
  - c. bahwa dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon.
  - d. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو ا أُو قُو ا بِالْعُقُو دِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلُحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلًا حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah figh:

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصلْحَةُ فَتُمَّ حُكُمُ اللهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
  - b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH

: Ketentuan Umum Pertama

- 1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- 2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- 3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- 4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.
- 5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Kedua

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

: 17 Jumadil Akhir 1421 H. Tanggal

16 September 2000 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

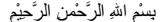
Dr. H.M. Din Syamsuddin

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

## **Tentang**

# SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN



## Dewan Syari'ah Nasional setelah

#### Menimbang

- : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
  - bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewa-jiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
  - bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
  - d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

# Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَأَلُّهُا الَّذِيْنَ آمَنُو الوَّفُو اللَّهُفُو دِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُلُّحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلُحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضرّر يُزالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan: a. Pendapat pe

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.

 Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-

NUNDA PEMBAYARAN

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.

- 3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: <u>17 Jumadil Akhir 1421 H</u>.

16 September 2000 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

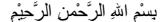
Dr. H.M. Din Syamsuddin

# DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

# FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 18/DSN-MUI/IX/2000

# Tentang

# PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH



## **Dewan Syariah Nasional setelah**

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lem-baga Keuangan Syari'ah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbul-kan kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencadangan menurut syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

# Mengingat

: 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

- 4. Kemaslahatan dan 'uruf dalam lembaga keuangan menghen-daki adanya pencadangan sebagai salah satu upaya mengu-rang resiko kerugian yang mungkin terjadi.
- 5. Kaidah fiqh:

# الأصلُّ فِي المُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضرّر يُزالُ.

"Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan."

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصِلْحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Memperhatikan: a.

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.

 Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG PENCADANGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN

SYARI'AH

Pertama : Ketentuan Umum

Kedua

Ketiga

1. Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS.

- 2. Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah.
- 3. Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan.
- 4. Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS.

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>17 Jumadil Akhir 1421 H</u>.

16 September 2000 M.

# DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.A. Sahal Mahfudh

Dr. H. Din Syamsuddin

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

**Tentang** 

**AL-QARDH** 

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang

- : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
  - b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang

diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

"Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة) "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Jama'ah).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

rgsmitra.com

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh:

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba."

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

# Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

- 1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

#### Kedua : Sanksi

- Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
- 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

# Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.
- Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 24

Muharram 1422 H

18 April

2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M. SAHAL MAHFUDH

PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001

**Tentang** 

# PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA SYARI'AH

# بِسْم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

# Menimbang

- : a. bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (*mu'amalah*) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat.
  - b. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi Syari'ah.
  - c. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama suka (al-taradi-التراضي), berkeadilan (al-'adalah العدالة) dan tidak saling merugikan (laa dharara walaa dhiraar- لا ضرر ).
  - d. bahwa salah satu bentuk mu'amalah pada masa kini adalah Reksa Dana
  - e. bahwa dalam Reksa Dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yang mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan Syari'ah Islam.
  - f. bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana untuk djadikan pedoman oleh LKS.

# Memperhatikan

- : a. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syari'ah, tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/29-30 Juli 1997 M.
  - b. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  - c. Surat dari PT. Danareksa Investment Management, nomor S-09/01/PS-DIM.
  - d. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 15 Muharram 1422 H./9 April 2001 dan hari Rabu, 24 Muharram 1422 H./18 April 2001.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT., antara lain:

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا الْاَتَأَكُلُوا أَمُو اللَّمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِثْكُمْ... (النساء: 29)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

"...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Bagarah [2]: 279).

"...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ..." (QS. al-Baqarah [2]: 198).

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaidah Figh:

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: FATWA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK REKSA DANA SYARI'AH

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- 1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
- 2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
- 3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
- 4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
- 5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
- 6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
- 7. Mudharabah/qirad adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
- 8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
- 9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

# BAB II MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARI'AH

#### Pasal 2

- 1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:
  - a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan
  - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
- 2. Karakteristik sistem mudarabah adalah:
  - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

rgsmitra.com

- b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

# BAB III HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

# **Hubungan dan Hak Pemodal**

- 1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakalah.
- 2. Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
- 3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah.
- 4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah.
- 5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi.
- 6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
- 7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
- 8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

#### Pasal 4

# Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

- 1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
- 2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syari'ah untuk setiap hari bursa.
- 3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah.
- 4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

rgsmitra.com

#### Pasal 5

# Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

- a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus;
- Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan
- d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 6

# Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- b. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan indentitas lainnya dari para pemodal;
- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

## **BAB IV**

## PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI

## Pasal 7

#### Jenis dan Instrumen Investasi

- 1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
- 2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;

- b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;
- c. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah;

#### Pasal 8

#### Jenis Usaha Emiten

- 1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
- 2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:
  - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
  - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
  - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

#### Pasal 9

## Jenis Transaksi yang Dilarang

- 1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management*/ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
- 2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
  - a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;
  - b. Bai al-Ma'dum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling);
  - c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
  - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

#### Pasal 10

# Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:

- a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%);
- c. apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

rgsmitra.com

#### **BAB V**

#### PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

#### Pasal 11

- 1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
- 2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
- 3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:
  - a. Dari saham dapat berupa:
    - *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
    - Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
    - Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
  - b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
    - Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
  - c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
    - Bagi hasil yang diterima dari issuer.
  - d. Dari Deposito dapat berupa:
    - Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.
- 4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidak-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.
- 5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 12

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H.

18 April 2001 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

K e t u a, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang

# PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

# Dewan Syari'ah Nasional setelah:

# Menimbang

- : a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
  - b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;
  - c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah;
  - d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

## Mengingat

: 1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil..." (QS. an-Nisa [4]: 58).

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. al-Maidah [5]: 90)

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. 2: 275)

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman" (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279)

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS. al-Baqarah [2]: 280)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.." (QS. an-Nisa [4]: 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

"Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

"Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya". (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari).

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."

3- الضَّرر بُزالُ.

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

Memperhatikan

- : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
  - Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.
  - Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

## : FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

Pertama

#### : Ketentuan Umum

- 1. Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
- 3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4. Akad **tabarru**' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

#### Kedua : Akad dalam Asuransi

- 1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
- 2. Akad **tijarah** yang dimaksud dalam ayat (1) adalah **mudharabah**. Sedangkan akad **tabarru**' adalah **hibah**.
- 3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b. cara dan waktu pembayaran premi;
  - c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

# Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

- Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);
- Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

# **Keempat**: Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

- Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2. Jenis akad **tabarru'** tidak dapat diubah menjadi jenis akad **tijarah**.

#### Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

- 1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

## Keenam : Premi

- 1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
- Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- 4. Premi yang berasal dari jenis akad **tabarru'** dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

- 1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3. Klaim atas akad <u>tijarah</u> sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4. Klaim atas akad <u>tabarru'</u>, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

# Kedelapan : Investasi

- 1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

## Kesembilan : Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

# Kesepuluh : Pengelolaan

- 1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- 3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

## Kesebelas : Ketentuan Tambahan

- 1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 17 Oktober 2001

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

ttd ttd

K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002

# **Tentang**

## **JUAL BELI ISTISHNA' PARALEL**

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

Menimbang

- a. bahwa akad jual beli *Istishna'* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya secara paralel (الاستصناع الموازي), yaitu sebuah bentuk akad Istishna' antara nasabah dengan LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai *Shani*';
- b. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang istishna' paralel untuk menjadi pedoman.

Menimbang

1. Hadist Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

2 Hadist Nabi:

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Al-Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

3. Kaidah fiqh:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

#### 4. Kaidah Fiqih

Kesulitan itu dapat menarik kemudahan

5. Kaidah Fiqih

Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat

6. Kaidah Figih

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)

#### Memperhatikan

- 1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonan Fatwa Istishna' Paralel.
- 2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

#### Pertama

#### FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA' PARALEL

Ketentuan Umum

- 1. Jika LKS melakukan transaksi Istishna', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat istishna' pertama tidak bergantung (mu'allaq) pada istishna' kedua.
- 2. LKS selaku mustashni' tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (shani') karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 3. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Istishna' (Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam Istishna' Paralel.

#### Kedua

:

#### Ketentuan Lain

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H.

28 Maret 2002 M

#### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

// \*

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002

### Tentang POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
- bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut

c. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat

1. man Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

2. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:
 يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو الْأَقَالُمُ الْمُو الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِثْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو ا أُوفُو ا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُو ا عَلَى الْبِرِ ۗ وَالتَّقُو َى وَلا وَتَعَاوَنُو ا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُو ان (المائدة: 2)

- "... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."
- 5. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

6. Idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابنُ عباسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا أَمرَ بإخراج بنِي النَضير جَاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يَا نَبي الله، إنكَ أمرت بإخراجنا ولنا على النَّاس دُيُونٌ لم تَحِلَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضعَوْا وتَعَجَّلُوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرك

وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Rasulullah Maka berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

7. dis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan

- 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878 tahun 2002.
- Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat

dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kedua

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 14 Muharram 1423 H.

28 Maret 2002 M.

#### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002

#### Tentang

#### **SAFE DEPOSIT BOX**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang : a.

- a. bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan istilah safe deposit box (SDB),
- b. bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan barang berharga tersebut,

c. bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah, QS. al-Bagarah [2]: 233:

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]: 26:

lah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, dari 'Aisyah r.a. ia berkata:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِيّنًا. والْخِرِيّتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ. وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا النِّهِ رَاحِلْتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ تُوْرٍ بَعْدَ تَلاَثِ لَيَالٍ، فَأَتَّاهُمَا بِرَاحِلْتَيْهِمَا صَبِيحَةً لَيَالٍ تَلاثٍ، فَأَتَّاهُمَا بِرَاحِلْتَيْهِمَا صَبِيحَةً لَيَالٍ تَلاثٍ، فَأَرَّدُهُمَا مِنَامِكَةً لَيَالٍ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُونُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

- bi SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedang laik-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji kepadannya untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah).
- Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

كُنَّا لُكْرِي الأرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَا أَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأُمَر نَا أَنْ لُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."

6. Hadis riwayat `Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَن اسْتَأْجَرَ أُجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

#### Memperhatikan :

- 1. Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No 3/37/DPP Tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk Layanan Safe Deposit Box BSM.
- 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

#### **FATWA TENTANG SAFE DEPOSIT BOX**

#### Pertama

- 1. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa).
- 2. Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- 3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
- 4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah.

#### Kedua

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H

28 Maret 2002 M

#### **DEWAN SYARIAH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

#### **Tentang**

#### **RAHN**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang;
  - bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional

memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat

1. Firman Allah, QS. Al-Bagarah [2]: 283:

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".

2. s Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

ungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

dak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

Inggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* 1985, V: 181).

6. Kaidah Figih:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1.

> وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة (المغنى لابن قدامة، ج 4 ، ص 367)

> لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاع بالرهن لا يترتب عليه نقص المرهون (مغنيَ المحتاجَ للشربيني، ج 2 ص 131)

> يَرَى اِلْجُمْهُوْرُ غِيْرُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

**MEMUTUSKAN** 

**FATWA TENTANG RAHN** 

Hukum Pertama

Menetapkan

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Ketentuan Umum Kedua

:

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun 4. tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5. Penjualan Marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.

- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

#### Kedua : Ketentuan Penutup

- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: <u>15 Rabi'ul Akhir 1423 H</u>

26 Juni 2002 M

#### DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Machfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

#### **Tentang**

#### **RAHN EMAS**

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Dewan Syariah Nasional setelah,

#### Menimbang

- : i. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang;
  - b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang;
  - d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةً...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....

2. s Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْد

ingguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

dak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." 4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

Inggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* 1985, V: 181).

6. Kaidah Figh:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan

- 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
- 2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

#### **MEMUTUSKAN**

•

Menetapkan

#### **FATWA TENTANG RAHN EMAS**

Pertama

:

- 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- 2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M

#### **DEWAN SYARIAH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002

#### **Tentang**

#### **AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK**

#### بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

#### **Dewan Syariah Nasional setelah,**

#### Menimbang

- a. bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewamenyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa,
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan akad sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah,
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik (الإجارة المنتهية بالتمليك) atau al-ijarah wa al-iqtina' (الإجارة والإقتتاء) untuk dijadikan pedoman.

#### Mengingat

1. Firman Allah, QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الْدَّنْيَا، ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ورَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Hadits Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya"

3. Hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الأرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."

4. Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلُحًا حَرََّمَ حَلالاً أُو الْحَلَّ حَرَّمَ حَلالاً أُو الْحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَّطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud:

"Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek."

- 6. Kaidah figh:
- الأصلُ فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلُ عَلَى a. وَلَا أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلُ عَلَى

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

#### Memperhatikan

- 1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonan Fatwa.
- Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H. / 28 Maret 2002.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI** 

**AL-TAMLIK** 

Pertama : Ketentuan Umum:

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
- 3 Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

#### Kedua : Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

- 1 Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
- 2 Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal
- e akad Ijarah adalah wa'd (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Ketiga :

- 1 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
- atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

#### Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>14 Muharram 1423 H.</u> 28 Maret 2002 M.

#### **DEWAN SYARIAH NASIONAL**

#### MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin

#### **FATWA**

#### DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002

### Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
- bahwa dalam 'urf tijari (tradisi perdagangan) transak-si jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
- c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:
 وَأُحَلَّ اللهُ النَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسلَّمَ قَالَ: إِنِّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda: الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُ بِالْبُرِ وَالشَّعِيرِ وَالْقَمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، قَادًا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شَبِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لا تَبِيْعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلاَّ مِثلاً بِمِثْلِ وَلا تُشْفُواْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثلاً بِمِثْلِ وَلا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيْعُوا مِثْهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيْعُوا مِثْهَا عَائِيًا بِنَاجِز.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah

menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Argam:

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

janjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyari'at-kan dengan syarat-syarat tertentu.

Memperhatikan

- 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
- 2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan

FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-tagabudh).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan pen-jualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مَمَا لاَ بُدُ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang diguna-kan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasi-kan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten-tuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : <u>14 Muharram 1423 H</u>. 28 Maret 2002 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin

#### FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002

**Tentang** 

#### PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang

- : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
  - b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1: 1. : Mengingat يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أُوقُوْا بِالْعُقُوْدِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَهُ ٱلأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُرَيْدُ (المائدة: عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ (المائدة: 1)

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]:26:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282:

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:

"Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

7. Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah: 8.

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...."

Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu 9. Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya."

Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari: 10.

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya."

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Kaidah Fiqh: 12.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat." Memperhatikan : 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.

Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002
 M./ 15 Rabi'ul Akhir 1423 H.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS

Pertama : Ketentuan Umum

- 1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- 4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

#### Kedua : **Ketentuan Penutup**

- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : <u>15 Rabi'ul Akhir 1423 H</u> 26 Juni 2002 M

#### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Machfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 30/DSN/VI/2002

#### **Tentang**

#### PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI'AH

### بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

#### Menimbang

- : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah fasilitas pembiayaan rekening koran, yaitu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari rekening koran dengan ketentuan yang disepakati;
  - b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - c. bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari'ah Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, QS. al-Ma'idah [5]:1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah agad-agad itu...".

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34:

..."Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya".

3. Firman Allah SWT, QS. al-Bagarah [2]: 275:

..."dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

4. Firman Allah SWT, QS. al-Bagarah [2]: 275:

النَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَأَحْلَ اللَّهُ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَاثَتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَاثَتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَاثَتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَاتْدُونَ لَلْهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُونَ وَالْمُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُلْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّذِمُ اللْ

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

5. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

6. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

7. Kaidah Figh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at."

Memperhatikan

: 1. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI'AH

**Pertama** 

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah;
- b. Wa'd (الموعد) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu;
- c. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melakukan akad (transaksi) tertentu yang diperlukan oleh nasabah;
- d. *Akad* adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

#### Kedua

:

Ketentuan Akad

- 1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dilakukan dengan wa'd untuk wakalah dalam melakukan:
  - a. pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara *murabahah* kepada nasabah tersebut; atau
  - b. menyewa (*ijarah*)/*mengupah* barang/*jasa* yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.
- 2. Besar keuntungan (*ribh*) yang diminta oleh LKS dalam angka **1** huruf **a** dan besar sewa dalam ijarah kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka **1** huruf **b** harus disepakati ketika *wa'd* dilakukan.
- 3. Transaksi *murabahah* kepada nasabah sebagaimana dimak-sud dalam angka **1** huruf **a** dan *ijarah* kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka **1** huruf **b** harus dilakukan dengan akad.
- 4. Fatwa DSN nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan *Rekening Koran Syariah (PRKS)* sebagaimana dimaksud dalam angka **1**, **2**, dan **3**.
- 5. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dapat dilakukan pula dengan *wa'd* untuk memberikan fasilitas pinjaman *al-Qardh*.
- 6. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-

Qardh berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Rekening Ko-ran Syariah (PRKS) sebagaimana dimaksud dalam angka **5**.

 Dalam menggunakan transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) sebagaimana dimaksud angka 1,
 dan 3, penarikan dana tidak boleh dilakukan secara langsung oleh nasabah.

Ketiga

#### Ketentuan Penutup

- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 15 Rabi'ul Akhir 1423 H

26 Juni 2002 M

#### DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Machfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

**Tentang** 

#### **PENGALIHAN HUTANG**

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

Menimbang

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyara-kat untuk mengalihkan transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah;
- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan hutang oleh LKS;
- c. bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5]:1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah agad-agad itu...".

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34:

"...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."

3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba...".

4. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

5 Firman Allah SWT., QS. al-Baqarah [2]: 275:

الذَيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَأَحَلَّ اللَّهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَاثْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَاثَتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَلْوَنْ لَا لَا اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْدَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّذِي اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّذِل

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

6. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

8. Kaidah Figh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةُ الضَّرُوْرَةِ د.

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالتَّابِتِ بِالشَّرْعِ d.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at."

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENGALIHAN HUTANG** 

: Ketentuan Umum

a. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

bank/lembaga keuangan syariah;

b. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.

d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayan kreditnya.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

#### Alternatif I

Memperhatikan

Pertama

- 1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملك التام).
- 2. Nasabah menjual aset dimaksud angka **1** kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
- LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran

secara cicilan.

- 4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.
- LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
- 2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka **1** adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- 3. LKS menjual secara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam **alternatif II** ini.
- 1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (الملك التام) atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
- Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3. Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka **1** tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka **2**.
- 4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka **1** tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka **2**.
- 1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملك التام).

#### **Alternatif II**

#### **Alternatif III**

#### **Alternatif IV**

- Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardhnya kepada LKS.
- 3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
- 4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam **alternatif IV** ini.

Ketiga

Ketentuan Penutup

- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H

26 Juni 2002 M

#### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Machfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

### FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002

## Tentang OBLIGASI SYARI'AH

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Dewan Syari'ah Nasional, setelah:

Menimbang

- : a. bahwa salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang selama ini didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi;
  - bahwa obligasi sebagaimana pengertian butir a. tersebut di atas, yang telah diterbitkan selama ini, masih belum sesuai dengan ketentuan syariah sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan syariah;
  - c. bahwa agar obligasi dapat diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5]:1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah agad-agad itu...".

Firman Allah SWT, QS. Al-Isra' [17]: 34:

"...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."

Firman Allah SWT., QS. Al-Bagarah [2]: 275:

الذين يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحْلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَأَحْلَّ اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَف، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَف، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الشَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَا اللَّهُ الْمَارِ الْمَارِ الْمُولُ فَيْهَا خَالِدُونَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ لَا اللَّهُ الْمَارُ الْمُؤْلِدُونَ لَنَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ لَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ لَا لَهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُونَ اللّهُ الْمُؤْلِدُونَ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

Kaidah Fiqih:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

Memperhatikan

- 1. Pendapat para ulama tentang keharaman bunga;
- 2. Pendapat para ulama tentang keharaman obligasi konvensional yang berbasis bunga;

- Pendapat para ulama tentang obligasi syariah yang meliputi obligasi yang menggunakan prinsip mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna', ijarah dan salam;
- 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
- 5. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna', Jual Beli Salam, dan Ijarah;
- 6. Surat dari PT. AAA Sekuritas No. Ref:08/IB/VII/02 tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa Obligasi Syariah;
- 7. Pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI tanggal 14 September 2002 tentang obligasi syariah.

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan *Pertama*

FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH

Ketentuan Umum

- 4. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga;
- 5. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- 3. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

#### Kedua

#### Ketentuan Khusus

Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:

a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh

b. Musyarakah
c. Murabahah
d. Salam
e. Istishna

f. Ijarah;

Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;

Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*Mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non

halal;

Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi

Syariah sesuai akad yang digunakan;

Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti

akad-akad yang digunakan.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : **Penutup** 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Jakarta** 

Tanggal : **06 Rajab 1423 H.** 

14 September 2002

М.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL** 

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002

#### **Tentang**

#### **OBLIGASI SYARI'AH MUDHARABAH**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

#### Menimbang

- : a. bahwa salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang selama ini didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi;
  - bahwa obligasi sebagaimana pengertian butir a. tersebut di atas yang telah diterbitkan selama ini, masih belum sesuai dengan ketentuan syariah sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan syariah;
  - c. bahwa agar obligasi dapat diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

2. Hadis Nabi SAW riwayat Al-Thabrani dari Ibn Abbas ra.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَهُ الشَّرَطَ عَلَى صَاحِيهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلاَ يَشْرُلُ فَعَلَ ذَلِكَ وَادِيًا وَلاَ يَشْتُرَيَ بِهِ دَابَّةُ ذَاتَ كَيدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرَطُهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرَطُهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه (رواه الطبراني في الأوسط)

Abbas bin Abdul Mutthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya.

3. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تُلاَثُ فِيْهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ الْبَرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ النَّبْعُ الْمُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ الْبَيْعُ الْمُقَارِضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

4. Hadis Nabi SAW riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf الصُّلْحُ جَائِزٌ' بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلاَّ شَرَ ْطًا حَرَّمَ حَلالاً فَرْامًا.

Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram.

5. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri:

الأضرر والأضرار (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما)

Seseorang tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain

6. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:

Nabi SAW menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan qurban (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi)

- 7. Ijma' para ulama tentang kebolehan menggunakan prinsip Mudharabah dalam investasi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni (V/135) dengan mengutip keterangan Ibnul Mundzir dalam Al-Ijma', Al-Kasani dalam Bada-i' Al-Shanai', Al-Shan'ani dalam Subulus Salam (III/103), Al-Zarqani dalam Syarhu Al-Muwattha' (IV/319) dan Wahbah Al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu (IV/838).
- 8. Kaidah Fiqih

اَلأصلُ فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى الْأُصلُ فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْر سُهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

## ٱلْحَاجَةُ قَدْ تَتْزِلُ مَنْزِلَة الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

## الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

#### Memperhatikan

- : 1. Pendapat para ulama tentang bolehnya mem-fasakh akad Mudharabah, karena berpandangan bahwa akad Mudha-rabah adalah ghairu lazim, diantaranya : Al-Khatib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj*, Juz II hal 319; Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, V hal 179; Al-Kasani dalam *Bada-i' Al-Sana-i'*, Juz VIII hal 3655;
  - Pendapat ulama tentang bolehnya pembagian pendapatan Mudharabah sebelum jatuh tempo selama disepakati dalam akad . Lihat: Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz V/57;
  - 3. Pendapat para ulama tentang kewajiban *Mudharib* untuk menjamin pengembalian dana Mudharabah dalam hal terjadi *ta'addi* (melampaui batas), *taqshir* (lalai), atau *mukhalafah al-syuruth* (pelanggaran syarat akad). Lihat: Wahbah Al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (V/3944) dan Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid dalam *Nahwa Tathwir Nidzam Al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah* (hal.127);
  - 4. Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi (حصنّة) suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat: Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu;
  - 5. Surat dari PT AAA Sekuritas No. Ref:08/IB/VII/02 tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa Obligasi Syariah.
  - 6. Pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI tanggal 14 September 2002;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

### FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH

Pertama

Ketentuan Umum

6. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

- Obligasi Syariah Mudharabah adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad Mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- 8. Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah Mudharib sedangkan pemegang Obligasi Syariah Mudharabah adalah *Shahibul Mal*

Kedua :

#### **Ketentuan Khusus**

Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah akad Mudharabah;

Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;

Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*Mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non halal;

Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah;

Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan;

Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Mudharabah dimulai;

Apabila Emiten (*Mudharib*) lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, *Mudharib* berkewajiban menjamin pengembalian dana Mudha-rabah, dan *Shahibul Mal* dapat meminta *Mudharib* untuk membuat surat pengakuan hutang;

Apabila Emiten (*Mudharib*) diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (*Shahibul Mal*) dapat menarik dana Obligasi Syariah Mudharabah;

Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

Ketiga

#### Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat

#### **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : **06 Rajab 1423 H.** 

14 September 2002

М.

#### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin** 

# FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002

#### **Tentang**

#### LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARI'AH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasilitas transaksi impor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah Letter of Credit (L/C) Impor;
- b. bahwa transaksi L/C Impor yang berlaku selama ini belum sesuai dengan ketentuan syariah;
- c. bahwa agar mekanisme transaksi L/C Impor tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah, QS. An-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذَيْنِ آمَنُوْ الاَ تَأْكُلُوْ ا أَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

• • •

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian ... ".

2. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

3. Firman Allah, QS Al Kahfi [18]: 19

فَابْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (الْكهف:19)

" Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun ".

an Allah, QS . Yusuf [12]: 55

Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman ".

<sup>5.</sup> an Allah, QS . Al Baqarah [2]: 283

- ... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...".
- 6. Firman Allah, QS. Al Qashash [28]: 26

- " Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Hai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya ".
- 7. Firman Allah SWT, QS. Yusuf [12]: 72

- " Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya ".
- 8. Firman Allah SWT, QS.Al-Baqarah [2]: 275

Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."

9. Firman Allah SWT, QS. Shad [38]: 24

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ...".

10. Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالُ مُضَارِبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلاَ يَنْزَلَ بِهِ وَادِيًا وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلْغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط)

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya.

11. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْتُ لِا النَّبِيُّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ الْبَرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan jewawut (gandum kasar) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

12. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.

13. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:

أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ دِيْنَارًا إلى حَكيْم بْنِ حِزَامٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أَضْحِيةً (رواه أبو داود والترمذي)

Nabi s.a.w. menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan gurban.

14. Hadits riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

### 15. Kaidah Fiqih:

الأصل فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

أَيْنَمَا وُحِدَتِ الْمَصلْحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

ٱلْمَشْقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةُ الْصَرَّوُرَةِ الْصَرِّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ النَّابِتِ النَّابِتِ النَّابِتِ النَّابِتِ النَّابِتِ النَّابِتِ النَّابِت

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

## Memperhatikan : 1. Pendapat ulama tentang Wakalah bil-Ujrah

تَصِحُ الْوَكَالَةُ بِأَجِرٍ وبغيرِ أَجرٍ, لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمَّاله لقبض الصَّدقاتِ ويجعلُ لهم عُمولةً...وإذا كانتِ الوكالةُ بأجر أي (بجعل) فحكمُها حكمُ الإِجارَاتِ.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (V/85), Asy-Syarkhasi dalam *Takmilah Fathul Qadir* (VI/2), Wahbah Al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (V/4058)

2. Pendapat ulama bahwa biaya dan ongkos yang dikeluarkan untuk memperoleh barang diperhitungkan sebagai harga perolehan barang (dimasukkan dalam komponen modal). Wahbah Al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (V/3771) berkata:

وأمَّا ما يلحَقُ برأسِ المالِ فهو كلُّ نفقةٍ أَنْفِقَتْ على السلّعة وأوجبتْ زيادةً في المعقودِ عليه سواءٌ في العين أو في القيمة وكان ذلك مُعْتَادًا الحاقه برأس المالِ عند التُجارِ...اعتبارًا اللّعُرْفِ والعرفُ حُجَّةٌ لما ورد من الأثر: ما رآهُ المسلّمُونَ حَسناً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسنَّ.

Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai Ijarah, Qardh,

Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah

- 4. Surat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002 tertanggal 11 Juli 2002 perihal permohonan fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor.
- 5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 14 September 2002/ 7 Rajab 1423 H.

#### Menetapkan

#### **MEMUTUSKAN**

#### FATWA TENTANG L/C IMPOR SYARIAH

#### Pertama

#### Ketentuan Umum

- 1. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
- 2. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah.

#### Kedua

#### Ketentuan Akad

Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

- Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
  - a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
  - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
  - c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
- Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
  - Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
  - Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
  - Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
  - d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

### Akad Murabahah dengan ketentuan:

- a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
- b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (at sight)

- dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (usance);
- c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

## 4. Akad Salam/Istishna'dan Murabahah, dengan ketentuan:

- a. Bank melakukan akad Salam atau Istishna' dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
- b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
- c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

## 5. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan:

- a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
- b. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor

#### 6. Akad Musyarakah dengan ketentuan:

Bank dan importir melakukan akad Musyarakah, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.

7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

#### Alternatif 1:

Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor

#### Alternatif 2:

Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

Ketentuan Penutup :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>07 Rajab 1423 H.</u>

14 September 2002 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002

#### **Tentang**

#### LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR SYARI'AH

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

Dewan Syariah Nasional setelah,

#### Menimbang

- : a. bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasilitas transaksi ekspor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C) Ekspor;
  - b. bahwa transaksi L/C Ekspor yang berlaku selama ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah;
  - c. bahwa agar mekanisme transaksi L/C Ekspor tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 16. Firman Allah, QS. An-Nisa [4]: 29

يَـا أَيُّهَـا الَّـذَيْنِ آمَـنُوْا لاَ تَأْكُلُـوْا أَمْـوَالْكُمْ بَيْـنَكُمْ بِالْـبَاطِلِ الِاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

. . . .

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian ...".

17. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو ا أُو قُوا بِالْعُقُودِ . . .

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

18. Firman Allah, QS. Al-Kahfi[18]: 19

فَابْعَثُوْ الْحَدَكُمْ بِورَقِكُمْ هذهِ إلى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلْطَفْ وَلا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا (الكهف:19)

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun". <sup>19.</sup> Firman Allah, QS . Yusuf [12] : 55

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman".

<sup>20.</sup> Firman Allah, QS . Al Baqarah [2] : 283

. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...".

21. Firman Allah, QS. Al Qasshash [28]: 26

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Hai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya".

<sup>22.</sup> Firman Allah SWT, QS. Yusuf [12]: 72

" Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya ".

<sup>23.</sup> Firman Allah SWT, QS.Al-Baqarah [2]: 275

"...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."

<sup>24.</sup> Firman Allah SWT, QS. Shad [38]: 24

وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلُ مَا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ... ".

25. Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اِشْتَرَطْ عَلَى صَاحِيهِ أَنْ لا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلا يَشْرَيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط)

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya.

26. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan jewawut (gandum kasar) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

27. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.

28. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi: أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ دِيْنَارًا إلى حَكيْم بْن حِزَامٍ لِيَشْنَرَىَ لَهُ بِهِ أَضْحِيَةً (رواه أبو داود والترمذي)

Nabi s.a.w. menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan qurban.

29. Hadis riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَطًا حَرَّمَ حَلالاً

### أُو ْ أُحَلَّ حَر َ امًّا ِ

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

#### Kaidah Figih: 30.

الأصل فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصِلْحَةُ فَتُمَّ حُكْمُ اللهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

َ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ الْتَيْسِيْرَ "Kesulitan dapat menarik kemudahan."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةً

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

#### Pendapat ulama tentang Wakalah bil-Ujrah Memperhatikan 1.

تَصبِحُ الْوكَالَةُ بأجر وبغير أجر ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمَّاله لقبض الصَّدقات ويجعل لهم عُمولْةً...و إذا كانتِ الوكالةُ بأجر أي (بجعل) فحكمُها حكمُ الأحًارُ اتِ

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (V/85), Asy-Syarkhasi dalam Takmilah Fathul Qadir (VI/2), Wahbah Al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (V/4058)

Pendapat para ulama tentang Al-Bai' (Jual-beli) dan 2. mewakilkan dalam jual-beli. Wahbah Al-Zuhaili dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (V/4078) berkata:

> وأمَّا التوكيلُ بالبيع والشِّراءِ فيجوز بلا خلاف بين الفقهاء لأنهما ممًّا يملِك الموكِّلُ مباشر تَهما بنفسه فيملك

التفويض إلى غيره.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai Ijarah, Qardh, Mudharabah, dan Musyarakah

4. Surat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002 tertanggal 11 Juli 2002 perihal permohonan fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor.

5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 14 September 2002/ 7 Rajab 1423 H.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG L/C EKSPOR SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum :

- 3. Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
- 4. L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah dan Al-Bai'.

Ketentuan Akad:

Kedua :

Akad untuk L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

- Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
  - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen a. ekspor;

Bank melakukan b.
penagihan (collection)
kepada bank penerbit L/C
(issuing bank),
selanjutnya dibayarkan
kepada eksportir setelah
dikurangi ujrah;

Besar ujrah harus c. disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.

- Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
  - Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
  - b. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank);
  - c. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;
  - d. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
  - e. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.

- f. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
- 3. Akad Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan:
  - Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
  - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
  - c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
  - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance);
  - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk:
  - f. Pembayaran ujrah;
  - g. Pengembalian dana mudharabah;
  - h. Pembayaran bagi hasil.
  - Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Akad Musyarakah dengan ketentuan:

- a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
- b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
- c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank);
- d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance);
- e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk:
- f. Pengembalian dana musyarakah;
- g. Pembayaran bagi hasil.

5.

Akad Al-Bai' (Jual-beli) dan Wakalah dengan ketentuan:

- a. Bank membeli barang dari eksportir;
- b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
- Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
- d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ketentuan Penutup

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>07 Rajab 1423 H.</u>

14 September 2002 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 36 /DSN-MUI/X/2002

#### **Tentang**

#### SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA

(SWBI)

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

#### Dewan Syariah Nasional setelah:

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah;
- b. bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan

sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah;

d. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah.

Mengingat

: 1. Firman Allah, QS. an-Nisa' [4]: 29

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi sukarela diantara kalian..."

2. Firman Allah, QS.Al-Baqarah [2]: 275

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

3. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang-nya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

4. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1

"Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian...".

5. Firman Allah, QS. An-Nisa' [4]: 58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."

Firman Allah, QS.al-Maidah [5]: 2

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi.

"Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu"

8. Kaidah Figih:

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 60)

"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 121)

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 63)

#### Memperhatikan

- : 1. Kesepakatan para ulama atas kebolehan berakad wadi'ah (alida' wa al-istida'). Lihat Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VI, h. 382; Al-Sarkhasi, al-Mabsuth, XI, h. 109; Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, V, h. 4018).
  - Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 2. hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG** SERTIFIKAT WADI'AH **BANK INDONESIA (SWBI)** 

Pertama

- : 1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
  - Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadi'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
  - Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
  - 4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Kedua

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal: 23 Oktober 2002 M.

16 Sya'ban 1423 H.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL** MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 37 /DSN-MUI/X/2002

#### **Tentang**

#### PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

#### Menimbang

- a. bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
  - c. bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT , QS. al-Maidah [5]: 1

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُودِ . . .

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu..."

2. Firman Allah SWT, QS. an-Nisa [4]: 58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...".

3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

4. Firman Allah SWT, QS. al-Bagarah [2]: 278

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman".

5. Firman Allah SWT, QS. al-Bagarah [2]: 280

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"

6. Firman Allah SWT, QS. an-Nisa [4]: 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.."

7. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 2

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

8. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

9. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

10. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:

"Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."

11. Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar".

12. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya yang lain."

13. Kaidah figih:

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 60)

"Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62)

"Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 121)

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan." (As-Suyuthi, Al-Asybah Nadzair, 78, 105).

- Memperhatikan : 1. Substansi fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/ 2001 Musyarakah, tentang Qardh, substansi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 dan 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Wadi'ah, serta fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
  - 2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H.

#### **MEMUTUSKAN**

: FATWA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BER-DASARKAN Menetapkan PRINSIP SYARI'AH

Pertama : Ketentuan Umum

- 7. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
- 8. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

- 9. Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 10. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3. adalah:
  - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
  - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

#### Kedua : Ketentuan Khusus

- 1. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah:
  - a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh
  - b. Musyarakah
  - c. Qardh
  - d. Wadi'ah
  - e. Al-Sharf
- Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1. menggunakan akadakad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

#### Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang berkedudukan di Indonesia, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### Keempat : **Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 23 Oktober 2002

<u>M.</u>

16 Sya'ban 1423 H.

## DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 38/DSN-MUI/X/2002

#### **Tentang**

## SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (SERTIFIKAT IMA)

### بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

#### Dewan Syari'ah Nasional setelah:

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank syariah dapat melakukan kegiatan usahanya pada Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah yang sudah ada;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah diperlukan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah;
  - c. bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah sertifikat investasi berdasarkan akad Mudharabah;
  - d. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang sertifikat investasi mudharabah antarbank;

#### Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 1

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu..."

2. Firman Allah, QS. an-Nisa [4]: 58.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 279

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

4. Firman Allah, QS.Al-Baqarah [2]: 275

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

5. Firman Allah, QS. al-Bagarah [2]: 278

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman"

6. Firman Allah, QS. al-Bagarah [2]: 280

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"

8. Firman Allah, QS. an-Nisa [4]: 29

Firman Alian, و. من من يَائَيُهَا الَّذِيْنَ ءَامِنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِثْكُمْ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.."

9. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 2

وتَعَاوِنُوا عَلَى البرِ وَالنَّقُورَى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

10 Hadist Nabi riwayat Ibn Majah dari Shuhaib:

"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

11 Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

12 Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar"

13 Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abu Rafi'

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya"

14 Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya

ومالك عن يحي)

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya yang lain."

#### 15 Kaidah Fiqih:

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

"Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62)

"Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

"Tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 121)

"Pencegahan dari kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 78, 105).

#### Memperhatikan

- : 1. Pendapat para ulama yang menegaskan: ( وَإِنَ اشْتَرَى لَحَدُ yang artinya: "Jika salah seorang dari yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain." (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz V hal: 56).
  - 2. Substansi fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
  - Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG SERTIFIKAT INVESTASI MUDHA-RABAH ANTARBANK (IMA)

Pertama : **Ketentuan Umum** 

- 1. Sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga, tidak dibenarkan menurut syariah.
- 2. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad Mudharabah, yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), dibenarkan menurut syariah.

- 3. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali.
- 4. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah:

c. bank syariah sebagai pemilik atau

penerima dana.

d. bank konvensional hanya sebagai

pemilik dana.

Kedua : Ketentuan Khusus

Implementasi dari fatwa ini secara rinci diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah dan oleh Bank

Indonesia.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang berkedudukan di Indonesia setelah tidak

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : **Penutup** 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan

diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: <u>23 Oktober 2002 M.</u>

16 Sya'ban 1423 H.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 39/DSN-MUI/X/2002

#### **Tentang**

#### ASURANSI HAJI بِسُمُ اللهِ الرَّحْمِنُ الرَّحِيْمِ

#### Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa perjalanan haji mengandung risiko berupa kecelakaan atau kematian dan untuk meringankan beban risiko tersebut perlu adanya asuransi;
- b. bahwa asuransi haji sudah termasuk dalam komponen biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibayar oleh calon jamaah haji melalui Departemen Agama RI;
- bahwa setiap calon jamaah haji mengharapkan semua proses pelaksanaan ibadah haji termasuk asuransinya sesuai dengan syariah agar mendapatkan haji mabrur;
- d. bahwa penyelenggaraan asuransi konvensional dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka asuransi yang digunakan harus sesuai dengan syariah;
- e. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Asuransi Haji.

Mengingat

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).

an Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam amal kebajikan, antara lain :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

3. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. al-Maidah [5]: 1)

4. Firman Allah, QS. an-Nisa [4]: 58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil..."

5. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 90

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

6. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

7. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 279

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

8. Firman Allah, QS. an-Nisa [4]: 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan

(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.."

10 Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

"Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga."

11 Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

"Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari dari Abu Rafi').

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya yang lain" (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

12 Kaidah fiqh yang menegaskan:

# 1- الأصل في المُعَامَلات الإباحة إلا الله يذل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 63)

"Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62)

"Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 121)

Memperhatikan : 1 Pendapat para ulama tentang bolehnya asuransi syari'ah:

لا شكَّ في جواز التَّأْمِيْن التعاونيِّ في الإسلام لأنه يدخلُ في عُقودِ التَّبرُّ عاتِ, ومن قبيلِ التعاون على البرِّ لأنَّ كلَّ مشتركٍ يدفعُ اشتر أكه بطيبِ نفسٍ لتخفيفِ آثار المخاطر و ترميم الأضرار التي تصيبُ أحدَ المشتركين

Tidak diragukan lagi bahwa asuransi ta'awuni (tolong-menolong) dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad Tabarru' dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan karena setiap peserta membayar kepesertaaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi. [Wahbah Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami, cet. IV tahun 1997, juz V/3416]

أنَّ أساسَ المنع في التأمينِ هو اشتماله على الغرر الذي نهى الشارع عنه، و نهى الشارع عن الغرر ينطبق على

## العقود التي يُقصد بها المعاوضة.

Asas pelarangan dalam asuransi (konvensional) adalah karena ia mengandung (unsur) gharar yang dilarang oleh syariat. Larangan syariah terhadap gharar yang dimaksud disini adalah pada akad-akad pertukaran (mu'awadhah). [Husain Hamid Hasan, Hukmu al-Syari'ah al-Islamiyyah fi 'Uquud al-Ta'miin, Darul I'tisham, 1976]

- 2 Substansi fatwa DSN nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syar'iah.
- Undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan pasal 7 Keppres nomor 55 tahun 2002.
- 4 Surat dari AJB Bumiputera 1912 No.277/Dir/BS/X/2002 tertanggal 16 Oktober 2002 perihal permohonan fatwa Asuransi Haji.
- 5. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG ASURANSI HAJI** 

#### Pertama : **Ketentuan Umum**

- Asuransi Haji yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional.
- 2 Asuransi Haji yang dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 3 Asuransi Haji yang berdasarkan prinsip syariah bersifat ta'awuni (tolong menolong) antar sesama jama'ah haji.
- 4 Akad asuransi haji adalah akad **Tabarru'** (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jama'ah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jama'ah haji sebagai pemberi *tabarru'* dengan Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.

#### Kedua : Ketentuan Khusus

- 1 Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jama'ah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jama'ah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana tabarru' yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
- Premi asuransi haji yang diterima oleh asuransi syariah harus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya.
- 4 Asuransi syariah dapat menginvestasikan dana *tabarru'* sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syar'iah, dan hasil investasi ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*.
- 5 Asuransi Syariah berhak memperoleh *ujrah* (*fee*) atas pengelolaan dana *tabarru'* yang besarnya ditentukan sesuai

dengan prinsip adil dan wajar.

6 Asuransi Syariah berkewajiban membayar klaim kepada . jama'ah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan akad

yang disepakati pada awal perjanjian.

- 7 Surplus Operasional adalah hak jama'ah haji yang
- . pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang berkedudukan di Indonesia setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : **Penutup** 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 23 Oktober 2002 M.

16 Sya'ban 1423 H.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR: 40/DSN-MUI/X/2003

## **Tentang**

# PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

## بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- : a. bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal;
  - b. bahwa pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan di berbagai negara;
  - c. bahwa umat Islam Indonesia memerlukan Pasar Modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah;
  - d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT., antara lain:

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اللَّهَ وَدَرُوْ ا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُو ا فَأَدَنُو ا يَعَالَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُو الكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة: 278- 278).

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah [2]: 278-279).

"Hai orang yavng beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).

"...Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah..." (QS. Al Jumu'ah [62]: 10).

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)

"Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al Khomsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya).

"Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar" (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

"Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu" (Muttafaq 'alaih)

"Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian" (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).

"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya" (HR Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Al-Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf). إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود والدار قطني والحاكم والبيهقي)

"Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah Pihak ketiga dari dua Pihak yang berserikat selama salah satu Pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu Pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya" (HR Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

"Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah" (HR Muslim).

3. Kaidah Figh:

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."

لا يَجُورْزُ لِأَحَدِ أَنْ يَتَصرَّفَ فِيْ مِلْكِ الْغَيْرِ بِلا إِنْنِهِ

"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya."

Memperhatikan

- : 1. Pendapat ulama, antara lain:
  - Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/173, [Beirut: Dar al-Fikr, tanpa thn]:

"Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain."

• Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz 3/1841:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ شَرَعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهُمِ شُرَكَاءُ فِي الشِّرْكَةِ بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُمِ شُرُكَاءُ فِي الشِّرْكَةِ بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُم

"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya."

Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang mubah, antara lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad 'Abdul Ghaffar al-Syarif (al-Syarif, Buhuts Fiqhiyyah Mu'ashirah, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], h.78-79); Dr. Muhammad Yusuf Musa (Musa, al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah, [t.t.: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas Qal'ahji, (Qal'ahji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhaw'i al-Fiqh wa al-Syari'ah, [Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999],

h.56). Syaikh Dr. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matrak (Al-Matrak, *al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah*, [Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1417 H], h. 369-375) menyatakan:

(الثاني) أسْهُمُّ فِي مُؤسَسَاتٍ مُبَاحَةٍ كَالْشِّرْكَاتِ التَّجَارِيَّةِ الْمُبَاحَةِ أَو الْمُؤسَسَاتِ الصِّنَاعِيَّةِ الْمُبَاحَةِ فَهذهِ: الْمُسَاهَمَةُ فيها و المشاركة فيها وبيع أسهمها، إذا كَانَتِ الشَّرْكَةُ مَعْرُوْفَةُ أَوْ مَشْهُوْرَةً وَلَيْسَ فِيْهَا عَرَرٌ وَلا جَهَالَةٌ فَاحِشَةٌ جَائِزَةُ، لِأَنَّ السَّهْمَ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ يَعُوْدُ عَلَى صَاحِبِهِ بِرِبْحِ نَاشِيءٍ مِنْ كَسْبِ التَّجَارَةِ وَالصِّنَاعَةِ، وَهذهِ حَلالٌ بِلا شَكِّ.

"(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan."

- Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi (حصنّة) suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (bi-idzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu' Syarh al-Muhazdzab IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881.
- Keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah:

"Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan."

- 2. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M.
- 3. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 4. SK DSN MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.
  - Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal 14 Maret 2003 M./ 11 Muharram 1424 H dan Pernyataan Bersama Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
  - 6. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 M/ 10 Jum. Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
- 7. Workshop Pasar Modal Syariah di Jakarta pada 14-15 Maret 2003 M/11-12 Muharram 1424 H.
- 8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Sabtu, tanggal 08 Sya'ban 1424 H./04 Oktober 2003 M.

rgsmitra.com

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: FATWA TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- 2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
- 3. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal <del>adalah surat berharga</del> yang akad, pengelolaan perusahaan<del>nya</del>, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
- 4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 5. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- 6. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

### BAB II

## PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

## Pasal 2

## Pasar Modal

- 1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
- 2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

## BAB III EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH

## Pasal 3

## Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.

rgsmitra.com

- 2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
  - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
  - c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
  - d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  - e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
- 3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
- 4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.
- 5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktuwaktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

## BAB IV KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH

## Pasal 4 Jenis Efek Syariah

- 1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- 2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
- 3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- 4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
- 5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- 6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah .

## BAB V TRANSAKSI EFEK

## Pasal 5 Transaksi yang dilarang

- 1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar, gharar,* riba, *maisir, risywah,* maksiat dan kezhaliman.
- 2. <del>Tindakan spekulasi</del> Transaksi yang mengandung unsur *dharar, gharar,* riba, *maisir, risywah,* maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
  - a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;
  - b. *Bai' al-ma'dum,* yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);
  - c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;<sup>1</sup>
  - d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
  - e. <del>Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya; dipindahkan ke pasal 2</del>
  - f. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan
  - g. *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
  - h. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

## Pasal 6

## Harga Pasar Wajar

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

## BAB VI PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

## Pasal 7

Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Akan disesuaikan pengertiannya dng yg ada di Bapepam/SRO

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 8

- 1. Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : <u>08 Sya'ban 1424 H</u>

04 Oktober 2003 M

## **DEWAN SYARIAH NASIONAL** MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr.K.H. M.A. Sahal Mahfudh

**Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin** 

# FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004

## **Tentang**

## **OBLIGASI SYARIAH IJARAH**

## بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syariah Nasional setelah,

:

## Menimbang

- a. bahwa Obligasi Syariah yang telah diterbitkan melalui fatwa DSN-MUI adalah Obligasi Syariah Mudharabah, sehingga belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap Obligasi Syariah yang lainnya;
- b. bahwa dewasa ini dibutuhkan instrumen obligasi berdasarkan prinsip Syariah untuk membiayai transaksi sewa-menyewa, sehingga diperlukan fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah;
- c. bahwa agar Obligasi Syariah Ijarah dapat diterbitkan, maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

## Mengingat

- 1. Firman Allah SWT., antara lain:
  - a. QS. al-Maidah [5]:1:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

b. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

c. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

- 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:
  - a. Hadis Qudsi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصِمْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلُ أَعْطَى بِي (أَي حَلَفَ بِالسَّمِيْ) ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا قَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا قَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ السُتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya" (HR. Muslim).

b. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

 Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukan-lah upahnya."

d. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ٱلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ٱلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأُمْرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

e. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صَلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صَلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرِطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Ijma' ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa (*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dr. Wahbah al-Zuhaili).

4. Kaidah fiqih:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.."

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama; antara lain:

 Imam al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, hal. 394:

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat."

b. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 7:

"Ijarah adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan sama dengan benda."

c. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 54:

"Penyewa boleh menyewakan benda yang disewa jika ia telah menerima benda tersebut."

d. Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab,* juz XV, hal. 308; al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz II, hal. 332; al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, juz III, hal. 108:

"...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda."

e. Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzah*, juz XV, hal. 383:

(أَحَدُهَا) أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ، كَمَا فِي الْمَبِيْعِ، لأَيَجُوْزُ بَيْعُ الْمَبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالإِجَارَةُ كَمَا تَقَدَّمَ كَالْبَيْعِ،

(وَالنَّانِيْ) أَنَّ الإِجَارَةَ جَائِزَةُ، لأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْمَثْقَعَةُ، وَالنَّانِيْ الْمُقَعَةُ الْمَنْقَعَةُ لاَتَصِيْرُ مَقْبُوضَةً بقَبْضِ الْمُؤَجِّرِ لِلْعَيْن، فَلَمْ يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْقَعَةِ قَبْضُ الْعَيْنِ.

(وَ الثَّالِثُ) يَجُوْنُ إِجَارَتُهَا مِنَ الْمُؤَجِّرِ، لأَنَّهَا فِيْ قَبْضَتِهِ، وَلاَ تَجُوْنُ فِيْ غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ فِيْ قَبْضَتِهِ.

"Jika penyewa bermaksud menyewakan benda yang disewa kepada pihak lain sebelum benda itu diterima, maka mengenai kebolehan penyewaan (kedua) tersebut terdapat tiga pendapat. *Pertama*, tidak boleh, sebagaimana halnya benda yang dibeli; artinya, tidak boleh menjual benda yang dibeli sebelum diterima; sedangkan ijarah (sewa menyewa) sama dengan jual beli (bai') sebagaimana keterangan terdahulu.

Kedua, penyewaan (kedua oleh penyewa) hukumnya boleh (sah), karena obyek ijarah adalah manfaat; sedangkan manfaat tidak dipandang telah diterima hanya dengan pemberi sewa telah menyerahkan benda yang disewakannya. Oleh karena itu, penyerahan benda tidak menimbulkan pengaruh hukum terhadap manfaat."

Ketiga, boleh hukumnya menyewakan benda yang disewa tersebut kepada pemberi sewa (pertama), karena benda itu berada pada tangannya; namun tidak boleh menyewakannya kepada selain pemberi sewa (orang lain), karena benda itu tidak berada pada tangannya."

f. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz VIII, hal. 56:

ويَجُورْ ُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِجَارَةُ الْعَيْنِ بِمِثْلِ الْأَجْرِ وَزِيَادَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَ أَبُو ْ تُورْ وَ ابْنُ الْمُدْذِرِ.

"Penyewa boleh menyewakan benda yang disewanya dengan sejumlah bayaran (sewa) yang sama atau lebih tinggi. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Pendapat yang sama dikemukakan pula 'Atha', al-Hasan, dan al-Zuhri; demikian juga dikemukakan oleh Iman Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibn al-Munzir."

g. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 113:

وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَمَانَةٌ فِيْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، إِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَقْرِيْطٍ لَمْ يَضمننها

"Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa; jika rusak bukan disebabkan kelalaian, penyewa tidak diminta harus bertanggung jawab (mengganti)."

h. Al-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 3, Cet. Ke-4, hal. 208,

وَيَجُونْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ ... وَيَجُونُ لَهُ أَنَ يُؤَجِّرَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ إِذَا قَبَضَهَا بِمِثْلُ مَا أُجَرَهَا بِهِ أَوْ أَنْ يُؤَجِّرَ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ إِذَا قَبَضَهَا بِمِثْلُ مَا أُجَرَهَا بِهِ أَوْ أَنْ يَكُ أَوْ أَقُلَّ.

Penyewa (musta'jir) boleh menyewakan barang sewaan.... Ia (penyewa) boleh pula menyewakan kembali dengan harga yang sama pada saat ia menyewa, lebih banyak atau lebih sedikit.

i. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Cet.4 Juz 5; hal. 3842:

إِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَارًا أَوْ حَانُوثًا أَوْنَحْوَهُمَا مِنَ الْمَنَازِلِ فَلَهُ الْاِنْتَقَاعُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ مِنَ السُّكْنَى بِنَقْسِهِ أَوْ السُّكَانِ غَيْرِهِ بِالإِجَارَةِ أَمْ بِالإِعَارَةِ، ولَهُ أَنْ يَضعَعَ فِيْهِ مَتَاعَ غَيْرِهِ.

"Jika seseorang menyewa rumah, toko atau tempat lainnya, ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik ditempati sendiri atau dengan menempatkan orang lain ke dalamnya melalui akad sewa menyewa atau dengan cara meminjamkan; ia (penyewa) boleh juga menaruh (memasukkan) benda orang lain di dalam tempat tersebut."

j. Dr. Ali Muhyiddin Ali al-Qarahdaghi, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, hal. 352-353:

وَيُمْكِنُ كَذَلِكَ إِصَدَارُ صَكُولُكِ لِلإِجَارَةِ الْعَادِيَةِ (أَي غَيْرِ مُنْتَهِيَةٍ بِالنَّمْلِيْكِ)، سَوَاءٌ كَانَتْ إِجَارَةَ الْأَعْيَانِ مَثْقُولُهُ أَوْ غَيْرَ مَثْقُولُهُ أَمْ إِللَّمْلِيْكِ)، سَوَاءٌ كَانَتْ إِجَارَةَ الْأَعْيَانِ مَثْقُولُهُ أَوْ غَيْرَ مَثْقُولُهُ أَمْ إِلَا عَمَالِ

Demikian pula dimungkinkan penerbitan Obligasi Ijarah biasa (bukan Ijarah Muntahiya Bittamlik), baik ijarah atas barang (a'yan), bergerak maupun tidak bergerak, ataupun ijarah atas jasa tenaga kerja.

k. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz V, hal. 173:

وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ حِصَّةٌ شَرِيْكِهِ مِنْهُ جَازَ، لِأَنَّهُ يَشْرَيْ مِلْكُ غَيْرِهِ (المغني لابن قدامة، بيروت: دار الفكر، دس؛ ج 5، ص 173)

"Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh, karena ia membeli milik pihak lain."

I. Al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, juz III, hal. 9:

وَلايَبِيْعُ الْوَكِيْلُ لِنَفْسِهِ وَمُولِّيْهِ وَإِنْ أُدِّنَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ وَقُدِّرَ لَهُ التَّمَنُ، خَلاَقًا لاَبْنِ الرِقْعَةِ... (قوله خلافًا لاَبنِ الرفعة) أي فِيْ تَجْوِيْزِهِ لِنَفْسِهِ وَمُولِّيْهِ... وَكَتَبَ السَّيِّدُ عُمرُ الْبَصْرِيُّ مَانَصَّهُ: قَوْلُهُ خَلاَقًا لاَبْنِ الرِقْعَةِ إلى كَلامُ ابْنِ الرِقْعَةِ وَجِيْهُ مَانَصَّهُ: قَوْلُهُ خَلاقًا لاَبْنِ الرِقْعَةِ إلى كَلامُ ابْنِ الرِقْعَةِ وَجِيْهُ حِيْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، لَكِنْ تَرْجِيْحُهُمْ مَنْعَ تَوْكِيْلِهِ لِلْهِيَّةِ مِنْ نَصْهِ يَرُدُهُ مِنْ حَيْثُ النَقْلُ (إعانة الطالبين، 3، ص 9)

"Wakil tidak boleh menjual kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang ada di bawah pengampuannya, walaupun hal itu telah diizinkan dan telah pula ditentukan harganya. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Rif'ah; maksudnya, menurut Ibnu Rif'ah, wakil boleh menjual kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang ada di bawah pengampuannya... Sayyid Umar al-Bashri menulis sebagai berikut: 'Pendapat Ibnu Rif'ah tersebut adalah pendapat yang sangat berbobot dan mempunyai landasan hukum, dilihat dari sudut makna (semangat hukum). Hanya saja, dilihat dari sisi naql, pendapat jumhur --yang memandang kuat bahwa wakil (dalam hibah) tidak boleh memberikan (hibah) kepada diri sendiri-- menolak pendapat Ibnu Rif'ah tersebut.'"

m. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* juz V, hal. 4094:

وَرُويَ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُورُ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ.. وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْحَنَفِيَّةُ لَأَيُجِيْزُونَ مُطْلَقًا بَيْعَ الْوَكِيْلِ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَلاَيُجِيْزُونَ هَذَا الْبَيْعَ إِلاَّ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْمُوكَلِّلُ بِالْبَيْعِ (وهبة، ج 5، ص 4097)

"Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa wakil tidak boleh membeli sesuatu untuk dirinya. Dengan demikian, nampak jelas bahwa ulama mazhab Hanafi secara mutlak tidak membolehklan wakil melakukan penjualan untuk (kepada) diri sendiri. Sementara itu, jumhur (mayoritas ulama) tidak membolehkan cara penjualan tersebut kecuali pihak yang mewakilkan mengizinkan penjualan kepada diri sendiri."

n. Munzir Qahf, *Mu'alajah al-'Ajz fi al-Mizaniyyah al-'Ammah fi al-Nizham al-Islami*, h. 14 dan 16:

و لِجَارِةٍ لِقَاءَ أَصُولُ ثَالِيَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِعْلاً، يَيْمُ تَمْلِيْكُهَا لِحَامِلِي الصَّكُولُّكِ، وَاسْتِنْجَارُهَا مِنْهُمْ، كَمَا يُمْكِنُ صُدُورُهَا لِقَاءَ أَصُولُ تَالِيَّةٍ، تَقُومُ الْحُكُومَةُ بِشِرَائِهَا وَكَالَةً عَنْ حَمَلَةِ الصَّكُولُكِ، ثُمَّ اسْتَنْجَارها بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ. (منذر قحف، معالجة العجز في الميز انية العامة في النظام الإسلامي، ص 14)

أَمَّا إِذَا كَانَ عَرِّضُ صَكُوْكِ الإِجَارَةِ لِلْجُمْهُوْرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيْقَةٍ عَامَّةٍ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً مِنْ قَبْلُ، فَإِنَّ الْحُكُومَةَ لأَتَسْتَطَيْعُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الْحَصْيْلَةَ فِيْ غَيْرِ بِنَاءِ الْحَدِيْقَةِ، لأَنَّهَا إِنَّمَا تَتَصَرَّفُ بِالْمَالِ تَصَرَّفُ أَلْكَ الْمَالِ تَصَرَّفَ الْوَكِيْلِ عَنْ مَالِكِهِ، (ص 16)

"Penerbitan shukuk (obligasi) ijarah dapat dilakukan terhadap (untuk) aktiva (asset) tetap yang telah ada. Kepemilikan aktiva tersebut beralih ke pemegang shukuk; dan (karena itu), penyewaan dilakukan dari mereka. Demikian juga, shukuk ijarah dapat diterbitkan terhadap (untuk) aktiva tetap di mana pemerintah membeli aktiva tersebut sebagai wakil dari pemegang shukuk, kemudian menyewanya dari mereka.

Jika shukuk ijarah ditawarkan kepada publik untuk kepentingan taman umum yang belum ada (belum dibangun), maka pemerintah tidak dapat menggunakan dana terkumpul untuk selain pembangunan taman. Hal

rgsmitra.com

itu karena pemerintah hanya dalam penggunaan dana tersebut hanya berstatus sebagai wakil dari pemiliknya."

- Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; Fatwa DSN-MUI nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah; Fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang PRKS; Fatwa DSN-MUI nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah; Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
- 3. Pendapat Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI tanggal 12 Muharram 1425/4 Maret 2004;
- 4. Surat dari PT. Mandiri Sekuritas No.062/MS/DIR/II/04 perihal permohonan Fatwa Obligasi Syariah Ijarah.

## **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan : FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH IJARAH

### Pertama: Ketentuan Umum

- Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/marjin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- 2. Obligasi Syariah Ijarah adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- 3. Pemegang Obligasi Syariah Ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai Musta'jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai Mu'jir (pemberi sewa).
- 4. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.

## Kedua : Ketentuan Khusus

- Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
- 2. Obyek Ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan.
- 3. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

- 4. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk asset yang telah ada maupun asset yang akan diadakan untuk disewakan.
- Pemegang OSI sebagai pemilik aset (a'yan) atau manfaat (manafi') dalam menyewakan (ijarah) asset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil.
- Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
- Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan ('iwadh ma'lum) sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.
- Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.
- 9. Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad

#### Ketiga **Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### Keempat **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Muharram 1425 H

Maret 2004 M

## DEWAN SYARI'AH NASIONAL **MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris.

Sahai Mahfudh

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004

**Tentang** 

## **SYARIAH CHARGE CARD**

بطاقة الإئتمان والحسم الآجل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

## Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai diperlukan charge card;
  - b. bahwa fasilitas charge card yang ada dewasa ini masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
  - c. bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
  - a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah agad-agad itu...".

b. QS.Yusuf [12]: 72:

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.""

c. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..."

d. OS. al-Furgan [25]: 67:

'Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),

mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

e. QS. Al-Isra' [17]: 26-27:

... "dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

f. QS. al-Isra' [17]: 34:

... "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya."

g. QS. al-Qashash [28]: 26:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

h. QS. al-Bagarah [2]: 275:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَأَحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ فَاثَتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

i. QS. al-Baqarah [2]: 282:

j.

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...".

QS. al-Baqarah [2]: 280:

"Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

- 2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
- a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَّطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَّطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَمَّا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَامًا حَرَّامًا فَيْ حَرَامًا .

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

الأَضْرَ رَ وَلاَضِر الرَ

'Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟ قَالُواْ: لاَ، فَصلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟ قَالُواْ: نَعَمْ، قَالَ: صَلُواْ عَلَى صَاحِيكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةً: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَارَسُولَ اللهِ، فَصلَّى عَلَيْهِ مِنْ عَلَى صَاحِيكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةً: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَارَسُولَ اللهِ، فَصلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau

sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."

d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung)."

e. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

f. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

q. Hadis Nabi riwayat Muslim, Nabi bersabda:

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya"

h. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, Nabi bersabda:

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

i. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad, Nabi bersabda:

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang

mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya."

j. Hadis Nabi riwayat Bukhari, Nabi bersabda:

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya."

- 3. Kaidah Figh; antara lain:
- الأصل في المُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إلا أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

"Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan

- 1. Pendapat fuqaha'; antara lain dalam:
  - a. Kitab I'anah al-Thalibin, jilid III/77-78:

(لا يما سيَجِبُ كدين قَرْض) سيَقَع ... وَذلِكَ كأنْ قالَ: أقْرضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِئُهَا، فَلا يَصِحُ ضَمَائُهُ لأَنَّهُ غَيْرُ تَابِت وقَدْ عَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِيْ فَصل القَرْضِ ذِكْرُ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِئًا فِيْهَا. وَعَبَارِئُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ : أقْرض هذَا مِائَةً ... وَأَنَا لَهَا ضَامِنً فَأَقْرضَ هذَا مِائَةً ... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرضَهُ الْمُائَة أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الأوْجَهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَم صِحَةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَ عَنْهُ مِنْ أَنَ الْمُوجَةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَ عَنْهُ مِنْ أَنَ الْمُوجَةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَ عَنْهُ مِنْ أَنَ الْمُوجَةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَ عَنْهُ مِنْ أَنَ

"(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti hutang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini hutang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena hutang orang itu belum terjadi. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (hutang) yang

belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini hutang sebanyak seratus ... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan hutang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, per-nyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman."

b. Kitab Mughni al-Muhtaj, jilid II: 201-202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونْ) وَهُوَ الدَّيْنُ... (كُونْهُ) حَقَّا (تَابِتًا) حَالَ الْعَقْدِ، فَلاَيَصِحُّ ضَمَانُ مَالَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيْمُ ضَمَانَ مَالمَ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيْمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَنَ مَاسَيَيْعُهُ أَوْ مَاسَيُقْرِضُهُ، لأَنَّ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَنَ مَاسَيَيْعُهُ أَوْ مَاسَيُقْرِضُهُ، لأَنَّ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ

"(Hal yang dijamin) yaitu hutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin hutang yang belum menjadi kewajiban... (*Qaul qadim --*Imam al-Syafi'i-menyatakan sah pen-jaminan terhadap hutang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan dihutangkan. Hal itu karena *hajat --*kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut."

c. Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُوْزُ عَقْدُ ٱلإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلَأَنَّ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى ٱلأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَيْانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوْزَ عَقْدُ ٱلإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat."

- d. Kitab Figh al-Sunnah, Sayyid Sabiq
- e. Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, al-Ma'ayir al-Syar'iyah, Mei 2001: al-Mi'yar al-Syar'iy, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan.
- 2. Substansi Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; Substansi Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;

- Substansi Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
- 3. Surat-surat masuk dari BII Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, perihal permohonan fatwa kartu syariah (Islamic Card).
- 4. Pendapat Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 07 Rabi'ul Akhir 1425 H. / 27 Mei 2004.

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan :

FATWA TENTANG SYARIAH CHARGE CARD

**Pertama** 

Hukum

Penggunaan charge card secara syariah dibolehkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kedua

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil albithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan.
- Membership fee (rusum al-'udhwiyah) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu;
- c. Merchant Fee adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn);
- d. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb alnuqud*)
- e. Denda keterlambatan (*Late Charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
- f. Denda karena melampaui pagu (*Overlimit Charge*) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

**Ketiga** : Ketentuan Akad

Akad yang dapat digunakan untuk Syariah Charge Card adalah:

a. Untuk transaksi pemegang kartu (hamil al-bithaqah) melalui merchant (qabil al-bithaqah/penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad Kafalah wal ijarah.

b. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-Qardh wal ijarah.

## Keempat

- 1. Ketentuan dan batasan (*dhawabith wa hudud*) Syariah Charge Card :
  - a. Tidak boleh menimbulkan riba.
  - b. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.
  - c. Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu.
  - d. Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas (ghalabah al-dayn).
  - e. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

### 2. Ketentuan Fee:

- a. *Iuran keanggotaan* (Membership fee)
  Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin *penggunaan* fasilitas kartu.
- b. Merchant Fee (ujrah)
  Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari
  harga objek transaksi atau pelayanan sebagai
  upah/imbalan (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq)
  dan penagihan (tahsil al-dayn).
- c. Fee Penarikan Uang Tunai
  Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang
  tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas
  pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya
  tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

## Kelima

## Denda-denda

- a. Denda Keterlambatan (*Late Charge*)
  Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
- b. Denda karena melampaui pagu (*Overlimit Charge*)
  Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena
  pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan
  (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu
  dan akan diakui sebagai dana sosial.

## Keenam

## Ketentuan Penutup

- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: <u>07 Rabi'ul Akhir 1425 H</u>

27 Mei 2004 M

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

DR. K.H. M.A. Sahal Machfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

# Tentang GANTI RUGI (TA'WIDH)

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

Menimbang

- : a. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
  - b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
  - c. bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;

- d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
- e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
- f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (ta'widh) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT.; antara lain:
  - a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...".

b. QS. al-Isra' [17]: 34:

- "...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya."
- c. QS. al-Baqarah [2]: 194:

"...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

d. QS. al-Bagarah [2]: 279-280:

- "... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."
- 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
  - a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

- مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ ... Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...'
- c. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لَىُّ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُو بَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لأضرر والأضرار.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

ٱلأُصلُ فِي الْمُعَامَلاتِ ٱلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضرَّرَ رُرُ بُزَ الُّ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan:

1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (dharar) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيْمُهُ مَنْعَهُ نَظَرْ نَا: فَإِنْ كَانَ مَحِلُّ الدِّيْنِ قَبْلَ مَحِلٌّ قُدُو مِهِ مِنَ السَّقَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لأَيَقُومُ إِلاَّ فِيْ سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَحِلُّ فِي الْمُحَرَّمِ أَوْ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَهُ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لْأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيْرِ حَقَّهِ عِنْدَ مَجِلِّهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِينًا أَوْ دَفَعَ رَ هُنًا يَفِي بِالدَّيْنِ عِثْدَ الْمَحِلِّ، فَلَهُ السَّفَرُ، لأَنَّ الضَّرَرَ يَزُولُ بِذلِكَ.

"Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo hutang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (qadai) yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan."

- 2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh;* antara lain sebagai berikut:
  - a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman,* Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِيْضُ: هُو تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِع بِالتَّعَدِّيْ أَو الْخَطَأِ (87) الأصلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَو التَّعْوِيْض: هُو إِزَالَهُ الضَّرَرِ عَيْنًا، كَاصِلاً حِ الْحَائِطِ... أَوْ جَبْرُ الْمُثلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيْحًا كَمَا كَانَ عَثِدَ الْإِمْكَانِ كَإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيْحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِيْضُ الْمِثْلِيُّ أَو التَقْدِيُّ (94)

وَأُمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَ الْخَسَارَ أَهُ الْمُنْتَظِرَةُ غَيْرُ الْمُؤكَّدَةِ (أَي الْمُسْتَقْبَلَةُ) أو الْأَضْرَارُ الْأَدَبِيَّةُ أو الْمَعْنَويَّةُ فَلاَ يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي الْمُسْتَقْبَلَةُ) أو الْأَضْرَارُ الْأَدَبِيَّةُ أو الْمَعْنَويَّةُ فَلاَ يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أصل الْحُكْمِ الْفَقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَ التَّعْوِيْضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلاً وَالْمُتَقَوَّمُ شَرْعًا (96) (وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، دار الفكر، دمشق، 1998)

"Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan" (h. 87).

"Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...
- (b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang" (h. 93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaat-kannya" (h. 96).

b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma'had al-`Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."

c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-*

Maliyah fi al-Fiqh al-Islami, al-Qahirah: al-Ma'had al-`Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّررَ يُزالُ حَسَبَ قَواعِدِ الشَّريْعَةِ، وَلا إِزَالَةَ إِلاَّ بِالتَّعُويْض، وَمُعَاقَبَهُ الْمَدِيْنِ الْمُمَاطِلِ لا تُقِيْدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُوْرَ. تَأْخِيْرُ أَدَاءِ الْحَقِّ يُشْبُهُ الْغَصْب، ويَنْبَغِيْ أَنْ يَأْخُدُ حُكْمَهُ، وَهُوَ أَنَّ الْغَاصِب يَضْمَنُ مَنَافِع الْمَعْصُوب مُدَّةَ الْغَصْب عِنْدَ الْجُمْهُورْ، الْغَاصِب عِنْدَ الْجُمْهُورْ، إِلَى جَنْب ضَمَانِهِ قِيْمَةَ الْمَعْصُوب لُو هَلَكَ (15-16)

"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab;* karena itu, seyogyanya stastus hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*ghasab* selama masa *ghashab,* menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak."

- 3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
- 4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
- 5. Rapat BPH DSN MUI BI Perbankan Syari'ah, 18 Juli 2004 di Lippo Karawaci-Tangerang.
- 6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH)

Pertama : Ketentuan Umum

- 1. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - 2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
  - 3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
  - 4. Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (oppor-tunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah).

- 5. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
- 6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

## Kedua : **Ketentuan Khusus**

- 1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

## Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **Keempat**: **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H

11 Agustus 2004 M

## DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Dr. K.H. M. A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

## FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 44/DSN-MUI/VII/2004

## **Tentang**

## **PEMBIAYAAN MULTIJASA**

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
  - b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
  - c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT; antara lain:
  - a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

c. QS. Yusuf [12]: 72::

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

e. QS. al-Ma'idah [5]:1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...".

f. QS. al-Isra' [17]: 34:

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya."

- 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
  - a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

b. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

ثُمَّ أَتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَارَسُولَ اللهِ، فَصلَقَى عَلَيْهِ. فَصلَقَى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mem-punyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

- g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban: عَنْ أَلِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي وَعَنْ أَنَسِ بُن مَالِكٍ وَعَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الزَّعِيمُ عَارِمٌ.
- h. Sabda Rasulullah SAW:

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

3. Kaidah figh; antara lain:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

"Kesulitan dapat menarik kemudahan"

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

## Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

## a. Kitab I'anah al-Thalibin, jilid III/77-78:

(لا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةُ وَأَنَا ضَامِئُهَا، فَلا يَصِحُّ ضَمَائُهُ لأَنَّهُ غَيْرُ تَابِتٍ. وقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِيْ فَصِلْ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِئًا فِيْهَا. وَعِبَارِتُهُ فَصِلْ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِئًا فَيْهَا. وَعِبَارِتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ : أَقْرَضَ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةُ أَوْ بَعْضَمَهَا كَانَ ضَامِئًا عَلَى الْأُوْجَةِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَم صِحَةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأُوْجَةِ الضَّمَانُ.

"Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti hutang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini hutang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena hutang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini -penjaminan terhadap suatu kewajiban (hutang) yang belum fix-dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini hutang sebanyak seratus ... dan aku men-jaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan hutang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman."

## b. Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202:

(ويُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُون) وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًا (تَّابِتًا) حَالَ الْعَقْدِ، فَلاَيَصِحُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَنِ فَلاَيَصِحُ الْقَدِيْمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَنِ مَاسَبَيْعُهُ أَوْ مَاسَبُقْ ضُهُ، لأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو الْلَهِ

(Hal yang dijamin) yaitu hutang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin hutang yang belum menjadi kewajiban... (*Qaul qadim* --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap hutang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan dihutangkan. Hal itu karena *hajat* --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut."

## c. Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُونُ عَقْدُ الإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْاعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُونُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan

rgsmitra.com

keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat."

- 2 Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- 3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
- 4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
- 5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004
- 6. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa daro Bank Danamon tanggal ....

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA

## Pertama

## Ketentuan Umum

- 1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
- 2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
- 3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
- 4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- 5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

## Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **Keempat**: **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H

11 Agustus 2004 M

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Dr. K.H. M. A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 45/DSN/II/2005

# Tentang

#### **LINE FACILITY**

(AT-TASHILAT AS-SAQFIYAH)

# بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

#### Menimbang

- : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *line facility (at-tashilat as-saqfiyah),* yaitu fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan yang disepakati dan mengikat secara moral;
  - b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - c. bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan

Syari'ah Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, QS. al-Ma'idah [5]:1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...".

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34:

..."Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya".

3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:

..."dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

4. Firman Allah SWT, QS. al-Bagarah [2]: 275:

'Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

5. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

<sup>&</sup>quot;Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat

dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

6. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

7. Hadits Nabi Riwayat Bukhari & Muslim dari Abu Hurairah:

"Tanda orang munafik ada tiga; jika berkata, ia dusta; apabila berjanji, ia ingkari; dan apabila diberi amanat, ia khianat." (HR. Muslim)

8. Kaidah Figh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الْمَشَقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at."

Memperhatikan

- 1. Keputusan Majma' Al-Fiqh Al Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI), Nomor: ..... tahun ....... tentang ......
- 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 08 Muharram 1426 H. / 17 Februari 2005.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

#### **FATWA TENTANG LINE FACILITY**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. *Line Facility* adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.

- b. Wa'd (الوعد) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum of Understanding.
- c. Wa'd yang telah disepakati tidak boleh disalahgunakan untuk pembiayaan di luar kesepakatan.
- d. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Line Facility.

#### Kedua

#### Ketentuan Akad

- 1. Line facility boleh dilakukan berdasarkan wa'd dan dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu sesuai prinsip syariah.
- 2 Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut di atas dapat berbentuk akad Murabahah, Istishna', Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah.
- Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee yang diminta oleh LKS harus mengacu kepada ketentuanketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat.
- 4. LKS hanya boleh mengambil margin, bagi hasil dan/atau fee atas akad-akad yang direalisasikan dari *Line Facility*.
- Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,, Fatwa DSN nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa DSN nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah berlaku pula dalam pelaksanaan akad-akad Pembiayaan yang mengikuti Line Facility.

### Ketiga

### Ketentuan Penutup

- I. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: <u>08 Muharram 1426 H</u>

21 Februari 2005 M

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,	Sekretaris,
Kerna	Sekretaris

Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005

# Tentang POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH (KHASHM FI AL-MURABAHAH)

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
- bahwa dalam hal nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang mengalami penuruan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
- Bahwa penghargaan dan merupakan mukafaah tasji'iyah (insentif) keringanan dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran;
- d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat

1. man Allah SWT; antara lain:

b.

a. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 275:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29: يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو اللَّاُكُلُو الْكُلُو الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

c. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو ْا أُو ْفُو ْا بِالْعُقُو ْدِ "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".

e. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 2:

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."

"... Jika

- 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
  - a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

b. Idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابنُ عباسِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه و آله وسلم لمَّا أَمَرَ بإخراج بنِي النَضير جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَر ْتَ بإِخْر اجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوْا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوْا وَتَعَجَّلُوْا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرك وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi Saw. memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabi Allah, Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

c. Hadits Nabi Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَهُ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَهُ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَهُ مِنْ كُرْبِ يَوْم الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْن أخيبهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

d. Idis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah figh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

4. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002

#### Memperhatikan

- 1. Surat dari pimpinan .... Nomor:
- 2. Hasil workshop 9-10 Dzulqa'dah 1425/21-22 Desember 2005.
- 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Muharram 1426 H./ 17 Februari 2005.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH** 

Pertama : Ketentuan Pemberian Potongan

- 3. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- 4. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- 5. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

# Kedua : Ketentuan Penutup

- 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1426 H

17 Februari 2005 M.

# **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005

# Tentang RESCHEDULING DALAM MURABAHAH

بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - bahwa dalam hal nasabah mengalami penuruan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
- c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dalam bentuk rescheduling dalam pembayaran kewajibannya.
- d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah

tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat

- 1. man Allah SWT; antara lain:
  - a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

- c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو ۠ا أُوْفُو ۠ا بِالْعُقُو ْدِ "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".
- e. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."

"... Jika

- 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
  - a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

b. Idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابنُ عباسِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه و آله وسلم لمَّا أمرَ بإخراج بني النصير جَاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يَا نَبي الله، إنكَ أمرت بإخر اجنا ولنا على النَّاس دُيُونٌ لم تَحِلَّ،

# فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضَعُوا وتَعَجَّلُوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرك وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orangorang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

Hadits Nabi Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرِبْهَ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَهُ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرِبَهُ مِنْ كُربِ يَوْم الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

d. Idis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلُحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah figh:

c.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

4. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002

Memperhatikan

- 1. Surat dari pimpinan .... Nomor:
- 2. Hasil workshop 9-10 Dzulqa'dah 1425/21-22 Desember 2005
- 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Muharram 1426 H./ 17 Februari 2005.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG RESCHEDULING HUTANG

**MURABAHAH** 

Pertama : Ketentuan Rescheduling

LKS boleh melakukan rescheduling hutang murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

a. Tidak menambah jumlah hutang yang

tersisa;

b. Pembebanan biaya dalam proses

rescheduling adalah biaya riil;

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 08 <u>Muharram 1426 H.</u>

17 Februari 2005 M.

### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005

# Tentang PENYELESAIAN DALAM MURABAHAH TAK MAMPU BAYAR

بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

#### Menimbang

- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
- b. bahwa dalam hal nasabah mengalami penuruan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
- bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas harus diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam;
- d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

#### Mengingat

- 1. man Allah SWT; antara lain:
  - a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو ْا أُوفُو ْا بِالْعُقُو ْدِ . . . "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".

e. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."

خَيْرٌ لَكُمْ ...

"... Jika

- 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
  - a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

b. Idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم لما أمر بإخر اج بني النضير جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخر اجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ضعوا وتعجلوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرك

# وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orangorang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

Hadits Nabi Riwayat Muslim:

c.

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ مَادَامَ الْعَبْدُ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

d. Idis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صَلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَّامَ وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَّطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

4. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002

#### Memperhatikan

- 1. Surat dari pimpinan .... Nomor:
- 2. 9-10 Dzulqa'dah Hasil workshop 1425/21-22 Desember 2005
- 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Dzulhijjah 1426 H./ 17 Februari 2005.

#### **MEMUTUSKAN**

FATWA TENTANG PENYELESAIAN MURABAHAH Menetapkan : TIDAK MAMPU BAYAR

Pertama **Ketentuan Penyelesaian** 

> LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- d Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- Nasabah melunasi sisa hutangnya e. kepada LKS dari hasil penjualan;
- Apabila hasil penjualan melebihi sisa f hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah;
- Apabila nasabah masih memiliki sisa h. hutang kepada LKS dan memiliki jaminan , maka LKS boleh menjual jaminan lainnya tersebut untuk melunasi hutang nasabah;
- i. Apabila obyek murabahah sulit untuk dijual, maka LKS dapat menjual jaminan lainnya.

#### Kedua **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya

- atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1425 H.

17 Februari 2005 M.

# **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005

# Tentang RECONDITIONING DALAM MURABAHAH

بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

#### Menimbang

- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
- bahwa dalam hal nasabah mengalami penuruan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
- c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dalam bentuk reconditioning dalam penyelesaian pembayaran kewajiban.
- d. Bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

#### Mengingat

- 1. man Allah SWT; antara lain:
  - a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:
 بَا ٓ أَبُهَا الَّذِیْنَ آمَنُو ا أَوْقُو ا بِالْعُقُو دِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".

e. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan tagwa...."

f. وَإِنْ كَانَ دُو ْ عُسْرُ وَ فَنَظِرٍ أَهُ إِلَى مَبْسَرَ وَ، وَأَنْ تَصدَّقُو ْا

خَيْرٌ لَكُمْ ...

"... Jika

- 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
  - a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجة وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

b. Idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم لما أمر بإخر اج بني النضير جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخر اجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ضعوا وتعجّلوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرك

# وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orangorang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

Hadits Nabi Riwayat Muslim:

c.

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ مَادَامَ الْعَبْدُ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

d. Idis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَّامً عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَّطًا حَرَّمَ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَّطًا حَرَّمَ حَرَامًا.

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

4. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002

#### Memperhatikan

- 1. Surat dari pimpinan .... Nomor:
- 2. Hasil workshop 9-10 Dzulqa'dah 1425/21-22 Desember 2005
- 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Muharram 1426 H./ 17 Februari 2005.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG RECONDITIONING MURABAHAH** 

Pertama : Ketentuan Reconditioning

LKS boleh melakukan reconditioning (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih memiliki prospektif dengan ketentuan:

- j. Akad murabahah dihentikan dengan cara:
  - i. obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
  - ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
  - iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
  - iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- k. LKS menyewakan obyek ex-murabahah yang telah dibeli kepada nasabah ex-murabahah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

Kedua : **Ketentuan Penutup** 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1426 H.

17 Februari 2005 M.

# **DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 50/DSN-MUI/III/2006

# Tentang

#### **AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH**

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang

: a. bahwa beberapa fatwa DSN yang memuat mudharabah, seperti Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai

akad Tijarah (Mudharabah) belum memuat akad Mudharabah Musytarakah.

- b. bahwa akad Mudharabah Musytarakah, yaitu salah satu bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Mudharabah Musytarakah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. al-Maidah [5]: 1).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya; dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. an-Nisa [4]: 58).

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. al-Maidah [5]: 90).

"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Bagarah [2]: 275).

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman" (QS.2 : al-Bagarah [2]: 278).

6) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْ الْا تَأْكُلُوْ الْمُوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوْ الْقُسْكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

"Hai orang yang berima!, Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa' [4]: 29).

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم 2) والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أبي هُريْرَةَ)

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

لاضرر و الضررار (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحي)

"Tiidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Kaidah fiqh, antara lain:

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."

3) الضَّررُ يُزالُ.

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

4. Ijma', sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili:

وَ أَمَّا الْاجْمَاعُ فَمَا رُويَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ دَفَعُواْ مَالَ الْيَتِيْمِ مُضَارِبَةً، وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ أُحَدِّ، فَكَانَ إِجْمَاعًا (الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، الجزء الخامس، ص: 3925).

"Mengenai Ijma', diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak ada seorang pun mengingkarinya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma'." (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004], juz V, h. 3925).

### Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- 1) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى اللسَّامِ مُضَارِبًا بِمَالَ السَيِّدَةِ خَدِيْجَةٌ بِنْتِ خُورِيلَادٍ، وكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّبُوةِ، ثُمَّ حَكَاهُ بَعْدَهَا مُقَرِّرًا لَهُ. (السيرة النبوية لابن هشام، (411 نحو تطوير نظام المضاربة، لمحمد عبد المنعم أبي زيد، ص: 141 سمنار المعنار ا
- (2) الْمُضَارِبَهُ عَقْدٌ مَشْرُوْعٌ بِلاَّ خِلاف بَيْنَ الْقُقَهَاءِ. أَمَّا ذَلِيْلُ هَذِهِ الْمَشْرُوْعِيَّةِ قَقَدْ تَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ الْمُسْتَدِ إِلَى السُّقَةِ التَّقْرِيْرِيَّةِ (نحو تطوير نظام المضاربة، ص.: 11) "Mudharabah adalah akad yang disyari'atkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pensyari'atan tersebut ditetapkan dengan ijma' yang didasarkan pada sunnah taqririyah." (Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, Nahwa Tathwir al-Mudharabah, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-`Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 11).
- القِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِكَ مَالان وبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا؛ فَهِذَا يَجْمَعُ شِرْكَةً وَمُضَارِبَةً؛ وَهُوَ صَحَدِيعٌ. فَلُو كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَلاَتَةُ آلاف دِرْهُم، لأَحَدِهِمَا أَلْفٌ ولأَخْرَ أَلْفَان، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْن لِصَاحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهَا عَلَى أَنْ يَكُونُ الرِبْحُ بَيْنَهُمَا نِصَفَيْن صَعَحَّ. ويَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ثَلُثُ الرِبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ، وَالْبَاقِيْ وَهُو ثَلُثًا الرِبْحِ بَيْنَهُما؛ صَحَحَّ. ويَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْن تَلاَتُهُ أُرْبَاعِهِ، ولِلْعَامِل رَبْعُهُ؛ وذَلِكَ لأَنّهُ جُعِلَ لَهُ نِصِفُ الرِبْحِ، فَجَعَلْنَاهُ لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْن تَلاَتُهُ أُرْبَاعِهِ، ولَلْعَامِل رَبْعُهُ؛ وذَلِكَ لأَنّهُ جُعِلَ لَهُ نِصِفُ الرِبْحِ، فَجَعَلْنَاهُ لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْن تَلاَتُهُ الْمُعَالِي وَلَيْعُهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ مُعْلِهِ فِي مَال شَرِيكِهِ، وللْعَامِل سَهُمُ وَهُو الرَّبُعُ بَيسْتَحِقُهُ بِعَمَلِهِ فِيْ مَال شَرِيكِهِ، ولَلْعَامِل سَهُمُ وهُو الرَّبُعُ بَيسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِيْ مَال شَرِيكِهِ، ولَيْعَهُ السَّهُم، وهُو الرَّبُعُ بَيسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِيْ مَال شَرِيكِهِ أَلْقَامُ مُن الْعَامِل سَهُمُ وَهُو الرَّبُعُ بَيسَتَعْ الْنِهِ الْقَامُ مُن الشَوْرِ وَقَلَ الْعُنْ الْقَاهُ وَلِي ثُلِنَاهُ وَلِي ثَلْنَاهُ وَلِي ثَلْنَاهُ وَلِي ثَلْتُهُ وَلَوْ الرَّبُعُ الْنَاهُ ولِي ثُلْلَهُ جَازَ ، وكَانَ وَقَالَ: أَضِيفُ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الله

Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini menggabungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah. Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu 2/3 (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 2000 memperoleh ¾ (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) memperoleh ¼ (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh ½ (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal mitranya; sedangkan porsi

rgsmitra.com

(keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu ¼ (seperempat)... Jika seseorang (shahib al-mal) menyerahkan kepada mudharib seribu sebagai mudharabah, dan ia berkata, "Tambahkan seribu dari anda, dan perniagakanlah modal dua ribu tersebut dengan ketentuan dibagi antara kita: untuk anda 2/3 (duapertiga) dan untukku 1/3 (sepertiga)," ha tersebut boleh hukumnya, dan itu aalah syirkah (musyarakah) dan qiradh (mudharabah)... (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 348).

4) وَالْمُضَارِبِ أَنْ يُسْهُمَ فِيْ رَأْسِ مَالِ الْمُضَارِبَةِ بِإِدْنِ رَبِّ الْمَالِ، وَتَتِمُّ قِسْمَةُ الرَّبُحِ بِسِبَبِ الْمُشَارِكَةِ فِيْ رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الطَّرَقَيْنِ بِقَدْرِ مَالَ كُلِّ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيْبَهُ الْمُشَارِكَةِ وَيْ رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الطَّرَقَيْنِ بِقَدْرِ مَالَ كُلِّ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصَيْبَهُ الْمُثَنَّرَكَة (المعاملات المالية المُعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص.107)

"Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin *rabbul mal* (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih duhulu) atas dasar musyarakah (antara mudharib sebagai penyetor modal/dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah". (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107) Ditambahkan:

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

### : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH

Pertama

#### : Ketentuan Umum

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Kedua

### : Ketentuan Hukum

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.

Ketiga

#### : Ketentuan Akad

- 1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
- 2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
- 3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- 4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

## Keempat : Ketentuan Penutup

- 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 23 Shafar 1427

23 Maret 2006

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh Drs. H.M. Ichwan Sam

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 51/DSN-MUI/III/2006

### **Tentang**

# AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang

- : a. bahwa akad Mudharabah Musytarakah untuk asuransi sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah;
  - b. bahwa fatwa Mudharabah Musytarakah untuk asuransi perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah;
  - c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah, antara lain :

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. Al-Nisa' [4]: 9).

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..." (QS. Shad [38]: 24).

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

5) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُو الْ الْ الْكُلُو الْمُوالِكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُو النَّقُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa [4]: 29)

6) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اللهَ يَعْظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ اللهَ نَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (النساء: 58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. an-Nisa [4]: 58).

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

2) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم عن أبي هريرة).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

# ...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرَّطًا حَرَّمَ حَلاًلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. 3) (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

# 3. Kaidah fiqh:

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

# Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama :

وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يُسْهِمَ فِيْ رَأْسِ مَالَ الْمُضَارِبَةِ بِإِدْنِ رَبِّ الْمَالَ، وَتَتِمُّ قِسْمَةُ الرِّبْحِ بِسَبَبِ الْمُشَارِكَةِ فِيْ رَأْسِ الْمَالَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِقَدْرِ مَالَ كُلِّ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيْبَهُ الْمُثَقَّقَ عَلَيْهِ عَنِ الْعَمَلِ، وَهذِهِ هِيَ الْمُضَارِبَةُ الْمُشْتَرَكَة (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص.107)

"Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin *rabbul mal* (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih duhulu) atas dasar musyarakah (antara mudharib sebagai penyetor modal/dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah". (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, h. 107, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002)

- 2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumad al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
- 3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.

#### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH

## Pertama : **Ketentuan Hukum**

- 1. Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.
- 2. Mudharabah Musytarakah diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving).

#### Kedua : Ketentuan Akad

- 6. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
- 7. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modalnya dalam investasi bersama peserta.
- 8. Modal perusahaan dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.

rgsmitra.com

- Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.
- 10. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b. besaran, cara dan waktu pembagian nisbah;
  - c. syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

#### 11. Hasil investasi:

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

#### Alternatif I:

- a. Hasil investasi dibagi antara Perusahaan (sebagai mudharib) dan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/ dipisahkan untuk/ disisihkan untuk Perusahaan Asuransi (sebagai mudharib), dibagi antara Perusahaan Asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing.

#### Alternatif II:

- a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana Perusahaan (sebagai musytarik) dan peserta (shahibul mal) berdasarkan porsi modal masing-masing.
- b. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/ dipisahkan untuk/ disisihkan untuk Perusahaan Asuransi (sebagai musytarik), dibagi antara Perusahaan Asuransi sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 7. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan

## Ketiga

# : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah

- 3. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
- 4. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor);

## Keempat

#### : Investasi

- 1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

#### Kelima

#### : Ketentuan Penutup

- 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 23 Shafar 1427

23 Maret 2006

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh Drs. H.M. Ichwan Sam

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 52/DSN-MUI/III/2006

## **Tentang**

# AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARI'AH

بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

### Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang

- a. bahwa fatwa DSN No.10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
  - b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk asuransi dan reasuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujrah (fee);

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Wakalah bil Ujrah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, antara lain :

1) وَلَيْخُشُ النَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهمْ دُرِيَّةً ضبِعَافاً خَافُوا عَلَيْهمْ فَلْيَتَقُوا اللهَ ولَيَقُولُوا قُولاً سَدِيْدًا (النساء: 9).

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. Al-Nisa' [4]: 9).

2) يَأْأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَاقَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللهَ، إِنَّ الله خَييْرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ (الحشر: 18).

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).

قَالَ الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ
 وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريضنَةٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيثُمٌ (التوبة: 60).

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Taubah [9]: 60).

4) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآعَلُواْ بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُمْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِمَالِبِثْتُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِورَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرَزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَفُ وَلا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا. (الكهف: 19).

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun." (QS. Al-Kahf [18]: 19).

5) اِجْعَانْنِيْ عَلَى خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ، إنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ. (يوسف: 55).

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman." (QS. Yusuf [12]: 55).

6) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اللهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِينَ اللهَ كَانَ اللهَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (النساء: 58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. " (QS. an-Nisa' [4]: 58).

7) وَإِنْ خِقْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدا إصْلاحاً يُوفَق اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خَبِيراً (النساء: 35)

"Dan jika kalian khawatirkan terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menilik" (QS an-Nisa' [4]: 35)

8) وتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعُدُوانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2).

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 2)

9) يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو ا أُوفُو ا بِالْعُقُودِ أُحِلَّت لَكُمْ بَهِيْمَهُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُرِيْدُ يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ (المائدة: 1)

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

10) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْ الْا تَأْكُلُو الْمُواَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)0

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."" (QS. an-Nisa [4]: 29)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam, antara lain:

مَدَّتَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّتَنَا سَفْيَانُ، حَدَّتَنَا شَييْبُ بْنُ غَرْقَدَة، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَي يُتَحَدَّتُونَ عَنْ عُرُوةَ: أَنَّ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاقً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ الْنَبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ، وَكَانَ لُو الشْتَرَى الثُرابَ لَربَحَ فِيْهِ (رواه بِالْبَركَةِ فِيْ بَيْعِهِ، وكَانَ لُو الشَّرَى الثُرابَ لَربَحَ فِيْهِ (رواه البخاري، [بيروت: دار الفكر، 1995]، ج 2، ص 323، رقم 3642)

"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib binGharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu eor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung." (H.R. Bukhari).

"Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya." (H.R. Bukhari).

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الْمَالِكِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ الْدِيْ أَمَرَ لِي عُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ للهِ، فَقَالَ: خُدْ مَا أُعْطِيْتَ، فَإِنِّي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسَولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. (متقق وَسَلَّمَ: إذا أعظينتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَقَقْ. (متقق عليه؛ نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، 2000] عليه؛ نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، 527) ، ج.: 4؛ ص.: 527)

"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah." (Muttafaq 'alaih. Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

"...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari `Amr bin `Auf)

### 3. Kaidah figh:

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

# Memperhatikan

: 1. Pendapat para ulama, antara lain:

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

# Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id (hadis nomor 3):

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan." (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ النَّهَا، وَتَصِحُ بِأَجْرٍ وَيَغَيْرِ أَجْرٍ.
 (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص: 89)

"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan." (Wahbah al-Zuhaili, **al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah**, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

4) تَصِحُ الْوَكَالَةُ بِأَجْرِ وَيَغَيْرِ أَجْرٍ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمُّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرِ أَيْ (بِجُعْلُ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. 6، ص. 2؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. 5 ص. 4058)

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah." (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, **al-Fiqh alIslami wa Adillatuh**, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

أَذِنَ (الْمُوكَكُّلُ) لَهُ (الْوَكِيْلِ) فِي التَّوْكِيْلِ فَيَجُوْزُ لَهُ ذَلِكَ، لأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلَهُ. (المغنى لإبن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، 2004]، ج. 6، ص. 470)

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

- 2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumad al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
- 3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23Maret 2006.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA
ASURANSI DAN REASURANSI SYARI'AH

Pertama : Ketentuan Hukum

- 3. Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi atau reasuransi dengan peserta.
- 4. Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana

rgsmitra.com

- disebutkan pada bagian kedua angka 3 (tiga) Fatwa ini dengan pemberian ujrah (fee).
- 5. Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru' (non-saving).

#### Kedua : Ketentuan Akad

- 1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah.
- 2. Akad Wakalah bil Uirah dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi atau reasuransi, baik dalam hal tabarru' maupun tabungan (saving). (bandingkan dengan angka 3 bag kedua)
- 3. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain:
  - a. kegiatan administrasi
  - b. pengelolaan dana
  - c. pembayaran klaim
  - d. underwriting
  - e. pengelolaan portofolio risiko
  - f. pemasaran
  - g. investasi
- 4. Dalam akad wakalah bil ujrah, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi;
  - c. syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

#### Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah

- 5. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada bagian kedua angka 3 (tiga) di atas.
- 6. Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk saving, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
- 7. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru', bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).
- 8. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemegang polis);
- 9. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- 10. Perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah. .

#### : Investasi Keempat

- 1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- 2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan

mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah, atau akad Mudharabah musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah musytarakah.

Kelima : Ketentuan Penutup

- 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427

23 Maret 2006

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh Drs. H.M. Ichwan Sam

# FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 53/DSN-MUI/III/2006

## **Tentang**

# AKAD TABARRU' PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARI'AH

بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْم

### Dewan Syari'ah Nasional setelah:

# Menimbang

- : a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
  - b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru' untuk asuransi;
  - c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru' untuk dijadikan pedoman.

### Mengingat

: 1. Firman Allah SWT, antara lain :

1) وَآثُوا الْيَتَامَى أَمُوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرٍ أَ (النساء: 2).

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. Al-Nisa' [4]: 2).

ولْيَخْشَ النِينَ لو ْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِيَّةٌ ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (النساء: 9).

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. Al-Nisa' [4]: 9).

3) يَأْأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ التَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَاقَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَقُوا اللهَ، إِنَّ الله خَبِيْرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ (الحشر: 18).

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).

- 2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
  - 1) يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أُوفُوْا بِالْعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَهُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُرِيْدُ يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ (المائدة: 1)

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).

2) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اللهَ كَانَ اللهَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (النساء: 58)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. an-Nisa [4]: 58).

3) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْ الْا تَأْكُلُوا أَمْوَ الْكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْقُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa [4]: 29).

3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2).

4. Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah). مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْنَكَى 2) مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشْدُ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى) 3)

"Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجِرْ بِهِ، وَلا يَثْرُكُهُ حَتَى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ 4) (رواه الترمذي والدار قطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص)

"Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)" (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin 'Amr bin Ash).

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

5. Kaidah figh:

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

2- الضرّر رُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ.

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."

3- الضرّر أير الأ.

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama; antara lain:

المَبْلَغُ الَّذِيْ يَدْفَعُهُ الْمُسْتَرَكُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مِنْهُ لِلشِّرْكَةِ، يُعَانُ مِنْهُ المُحتَّاجُ بِحَسَبِ النَّظَامِ المُتَقَقِّ عَلَيْهِ، وَالشَّرْكَةُ ثَقَدَّمُهُ بِصِفَةِ تَبَرُّعٍ أَوْ هِبَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ غَيْرِ مُقَايِلٍ أَوْ عِوَضٍ. (المعاملات المالية المعاصرة، ص. 276)

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru' atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).

2) وَالتَّخْرِيْجُ الْفِقْهِيُّ لِتَبَادُلِ الْالْتِرَامِ بِالنَّبَرُّعِ فِيْ عَقْدِ التَّأُمِيْنِ التَّعَاوُنِيِّ أَسَاسُهُ قَاعِدَهُ الْالْتِرَامِ بِالنَّبَرُّعَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (نظام التأمين لمصطفى الزرقاء، ص. 58-59، عقود التأمين وعقود ضمان الاستثمار لأحمد السعيد شرف الدين ص.244-244، التأمين بين الحظر والإباحة لسعدي أبي جيب، ص.53)

Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru' secara bergantian dalam akad asuransi ta'awuni adalah "kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru'" dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa', Nizham al-Ta'min, h. 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf al-Din, 'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa'di Abu Jaib, al-Ta'min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).

(3) إِنَّ الْعَلَاقَةُ الْقَانُونَيَّةُ الَّتِيْ تَنْشَأُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِيْنَ نَتِيْجَةٌ عَقْدِ التَّأْمِيْنَ الْجَمَاعِيِّ تَتَسِمُ بِالطَّابِعِ التَّبَرُّعِيِّ؛ فَكُلُّ مُسْتَأْمِنِ مُتَبَرَعٌ لِغَيْرِهِ بِمَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِنَ التَّغويْضَاتِ الَّتِيْ تُدُفَعُ لِلْمُتَضَرِّرِيْنَ مِنَ الْمُسْتَأْمِنِيْنَ؛ وَفِي الْوَقْتِ نَقْسِهِ هُوَ مُتَبَرَّعٌ لَهُ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ تَدْفَعُ لِلْمُتَضَرِّرِيْنَ مِنَ الْمُسْتَأْمِنِيْنَ؛ وَفِي الْوَقْتِ نَقْسِهِ هُوَ مُتَبَرَّعٌ لَهُ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ تَعْوِيْضٍ عِنْدَ تَضَرَرُهِ (التَّأْمِيْنَ الإسلامي لأحمد سالم ملحم، ص. 83)

Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru'; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru' kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru' ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta'min al-Islami, h, 83).

- Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumad al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
- 4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARI'AH

Pertama : Ketentuan Hukum

- 11. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah.
- 12. Akad **tabarru'** pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

13. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

#### Kedua

#### : Ketentuan Akad

- 3. Akad Tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2. Dalam akad Tabarru', sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu
  - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

#### Ketiga

#### : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'

- 11. Dalam akad **tabarru' (hibah)**, peserta memberikan *dana* hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.
- 12. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (mu'amman/mutabarra' lahu, مؤمّن/متبر ً dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri'- مؤمّن/متبر ً على).
- 13. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.

## Keempat

## : Pengelolaan

- 4. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 5. Pembukuan dana Tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
- 6. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta (dana tabarru') dan dibukukan dalam akun tabarru'.
- 7. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah.

# Kelima

### : Surplus Underwriting

- 1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
  - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
  - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan

reasuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

## Keenam : **Defisit Underwriting**

- 1. Jika terjadi defisit underwriting (defisit tabarru') atas dana tabarru', maka perusahaan asuransi atau reasuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
- 2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan ditutup dari surplus dana tabarru'.

# Ketujuh : **Ketentuan Penutup**

- 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427

23 Maret 2006

# DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh Drs. H.M. Ichwan Sam